

**RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2025**

**DINAS KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
(DKBP3A)**



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN

**DINAS KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
(DKBP3A)**

*Jln. Raya Parigi No. 24 Tlp/Fax.(0265) 7500624
Ds. Karangbenda Parigi – 46393*



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jln. Raya Parigi No. 24 Tlp/Fax.(0265) 7500624 Ds. Karangbenda Parigi - 46393

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR : 000.7.2.4/Kpts /074/DKBP3A/2024

TENTANG

RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2025

KEPALA DINAS KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PANGANDARAN,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu disusun Rencana Kerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pangandaran Tahun 2025;
- b. Bahwa Rencana Kerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 disusun berpedoman pada Peraturan Bupati Pangandaran

Nomor 75 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2024. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 77 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024, Renstra DKBP3A Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program kegiatan yang berasal dari masyarakat;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pangandaran tentang Rencana Kerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pangandaran Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
19. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
22. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
23. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
31. Peraturan Menteri Dalam Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 264);
32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran, Klasfikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun

2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 236);

34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);
35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 237) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 252);
36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);
37. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 25);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15);

39. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 4);

43. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2);
44. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 58 tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
45. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2017 Nomor 53);
46. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 Nomor 11);
47. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 26 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 Nomor 26);
48. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 40 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2025

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Keputusan Kepala DKBP3A Kabupaten Pangandaran ini, yang dimaksud dengan :

1. Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
2. Rencana Strategis Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021-2026, yang selanjutnya disebut Renstra DKBP3A adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.
3. Rencana Kerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 yang selanjutnya disebut Renja DKBP3A adalah dokumen perencanaan DKBP3A untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

BAB II SISTEMATIKA RENJA Pasal 2

Sistematika Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran berpedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dengan sistematika sebagai berikut :

I. Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

II. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

V. Penutup

BAB III

ISI DAN URAIAN RENJA

Pasal 3

Isi beserta uraian Renja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 4

Renja DKBP3A Tahun 2025 dijadikan pedoman penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) DKBP3A Tahun 2025.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Kepala DKBP3A ini sepanjang mengenai Teknis Pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala DKBP3A.

Ditetapkan di Parigi
Pada tanggal 24 Juli 2024

KEPALA DINAS KELUARGA
BERENCANA PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK KABUPATEN PANGANDARAN


DANI HAMDANI

Tembusan:

Yth. Kepala BAPPEDA Kab. Pangandaran

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan pada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya kami telah dapat menyelesaikan Rencana Kerja (RENJA) yang telah ditetapkan untuk Tahun anggaran 2025.

Rencana Kerja (RENJA) ini didalamnya merupakan penentuan indikator kinerja yang dapat terukur secara kuantitatif maupun kualitatif untuk menggambarkan tingkat pencapaian dan keberhasilan suatu kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025.

Dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini kami telah berupaya semaksimal mungkin walaupun dalam proses penyusunannya kami mengalami hambatan, karena keterbatasan yang ada, harapan kami semoga Rencana Kerja (RENJA) ini dapat dijadikan acuan oleh semua pihak yang berkepentingan sehingga dapat dirasakan manfaatnya dalam upaya pencapaian hasil yang terbaik bagi setiap program kegiatan yang dilaksanakan.

Rencana Kerja (RENJA) DKBP3A Kabupaten Pangandaran ini kami sadari masih jauh dari kata sempurna, masih terdapat kekurangan didalamnya, untuk itu kami mohon masukan dan saran yang dapat dijadikan bahan perbaikan oleh kami untuk menyusun Rencana Kerja (RENJA) yang akan datang agar lebih baik.

Akhirnya, besar harapan kami semoga dengan tersusunnya Rencana Kerja (RENJA) DKBP3A Kabupaten Pangandaran ini dapat memberikan penjelasan dan informasi yang berguna, serta sebagai upaya untuk lebih meningkatkan kinerja pada DKBP3A Kabupaten Pangandaran.

Parigi, 24 Juli 2024

KEPALA DKBP3A
KABUPATEN PANGANDARAN



H. DANI HAMDANI, S.Sos., MM
NIP. 196504171990031013

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 LANDASAN HUKUM.....	2
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	8
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN	9
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	12
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH	12
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	48
2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH.....	52
2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD	52
2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT	79
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	80
3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL	80
3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH	86
3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN	84
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ...	111
BAB V PENUTUP	140

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya diuraikan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 – 2026.

Peraturan tersebut secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2025.

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Pemerintah Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 DKBP3A adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
19. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
22. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);

23. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
31. Peraturan Menteri Dalam Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 264);
32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran, Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 236);
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);
35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 237) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 252);

36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);
37. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 25);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 4);

43. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2);
44. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 58 tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
45. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2017 Nomor 53);
46. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 Nomor 11);
47. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 26 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 Nomor 26);
48. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 40 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 Nomor 40);

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah DKBP3A Kabupaten Pangandaran disusun dengan maksud :

- a. Mengarahkan seluruh dimensi kebijakan pembangunan Kabupaten Pangandaran Khususnya pada Urusan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak; dan
- b. Merupakan dokumen perencanaan dan prioritas program satu tahun.

Tujuan disusunnya Renja Perangkat Daerah DKBP3A adalah :

- a. Memperoleh dokumen rencana kerja untuk satu tahun;
- b. Memberikan arah dan acuan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada DKBP3A; dan
- c. Memberikan pedoman operasional sebagai dasar bagi Perangkat Daerah dalam mengoperasionalkan RKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) DKBP3A tahun 2025 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

a) BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menjelaskan secara ringkas pengertian Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, keterkaitan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dengan dokumen Perangkat Daerah, Renstra Perangkat Daerah, Renja K/L dan Renja Provinsi dan tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Menjelaskan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

3.1 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

b) BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Menjelaskan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan dan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun berjalan.

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Menjelaskan capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Renstra Perangkat Daerah.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Menjelaskan tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dampak terhadap pencapaian visi dan misi Bupati terhadap capaian program nasional/internasional seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals), serta tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Menjelaskan hasil penelaahan terhadap Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan pada setiap Perangkat Daerah.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Menjelaskan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan.

c) BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Menjelaskan hasil telaahan terhadap arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Menjelaskan tujuan dan sasaran didasarkan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

2.3 Program dan Kegiatan

Menjelaskan program dan kegiatan Perangkat Daerah pada tahun rencana yang dilengkapi dengan lokasi dan indikasi pendanaan yang dibutuhkan berdasarkan sumber dana APBD.

d) BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

e) BAB V PENUTUP

Menjelaskan kaidah pelaksanaan sesuai dengan Renja Perangkat Daerah, penegasan komitmen Perangkat Daerah terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD, serta penegasan Rangkah Renja Perangkat Daerah sebagai acuan penyusunan RKA Perangkat Daerah pada tahun rencana.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Seperti yang tertuang dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap Perangkat Daerah berkewajiban mengevaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu atau sebelumnya, hal ini bertujuan tidak lain untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah, serta hambatan permasalahan yang dihadapi.

Jenis program dan kegiatan yang direncanakan di dalam Renja Perangkat Daerah terkait dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan antara pemerintah dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Adapun tiap urusan dijabarkan kembali dengan program dan kegiatan yang didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Adapun Evaluasi pelaksanaan Renja DKBP3A secara detail dapat dilihat dalam form berikut (TC-29) :

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja DKBP3A dan Pencapaian Renstra DKBP3A s/d Tahun 2024 Kab. Pangandaran

DKBP3A

Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
											Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1							2	3	4	5	6	7	8=7/6*100	9	10=5+7+9	11=10/4*100
2	0	8					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									
2	0	0	8	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi 2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik 3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur 4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	1. 100 2. 100 3. 100 4. 100	1. 80 2. 100 3. 80 4. 100	1. 85 2. 100 3. 85 4. 100	1. 85 2. 100 3. 85 4. 100	100,00	1. 90 2. 100 3. 90 4. 100	1. 90 2. 100 3. 90 4. 100	100,00

Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
											Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisa si (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1							2	3	4	5	6	7	8=7/6*100	9	10=5+7+9	11=10/4*100
2	0	0	2	0			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu 2. Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu 3. Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	1. 100 2. 100 3. 100 %	1. 100 2. 100 3.100 %	1. 100 2. 100 3.100 %	1. 100 2. 100 3.100 %	100,00	1. 100 2. 100 3. 100 %	1. 100 2. 100 3. 100 %	100,00
2	0	0	2	0	0	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00
2	0	0	2	0	0	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	21 Laporan	0 Laporan	3 Laporan	0 Laporan	0,00	3 Laporan	3 Laporan	100,00
2	0	0	2	0			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00	100 %	100 %	100,00
2	1	0	2	0	0	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang/Bulan	14 Orang	23 Orang/Bulan	23 Orang/Bulan	100,00	23 Orang/Bulan	23 Orang/Bulan	100,00

Kode							Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
											Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisa si (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1							2	3	4	5	6	7	8=7/6*100	9	10=5+7+9	11=10/4*100
2	0	0	2	0	0		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	98 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	9 Dokumen	64,29	14 Dokumen	14 Dokumen	100,00
2	0	0	2	0	0		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	0,00	1 Laporan	1 Laporan	100,00
2	0	0	2	0			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik	32 dan 420 Jenis dan Unit/Buah	24 dan 257 Jenis dan Unit/Buah	32 dan 390 Jenis dan Unit/Buah	32 dan 390 Jenis dan Unit/Buah	100,00	32 dan 400 Jenis dan Unit/Buah	32 dan 400 Jenis dan Unit/Buah	100,00
2	0	0	2	0	0		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	84 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100,00	12 Laporan	12 Laporan	100,00
2	0	0	2	0			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang baik	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00	100 %	100 %	100,00
2	0	0	2	0	0		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	520 Paket	0 Paket	104 Paket	0 Paket	0	104 Paket	104 Paket	100,00
2	0	0	2	0	0		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	168 Dokumen	22 Dokumen	24 Dokumen	18 Dokumen	75,00	24 Dokumen	24 Dokumen	100,00

Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
											Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisa si (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1							2	3	4	5	6	7	8=7/6*100	9	10=5+7+9	11=10/4*100
2	0	0	2	0	0		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 Orang	0 Orang	5 Orang	0 Orang	0	5 Orang	5 Orang	100,00
2	0	0	2	0	1		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	100 Orang	0 Orang	100 Orang	0 Orang	0	100 Orang	100 Orang	100,00
2	0	0	2	0	1		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	100 Orang	0 Orang	100 Orang	0 Orang	0	100 Orang	100 Orang	100,00
2	0	0	2	0			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00	100 %	100 %	100,00
2	0	0	2	0	0		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	49 Paket	6 Paket	6 Paket	5 Paket	83,33	6 Paket	6 Paket	100,00
2	0	0	2	0	0		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	349 Paket	46 Paket	24 Paket	24 Paket	100,00	50 Paket	50 Paket	100,00
2	0	0	2	0	0		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	205 Paket	27 Paket	19 Paket	19 Paket	100,00	28 Paket	28 Paket	100,00

Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
											Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisa si (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1							2	3	4	5	6	7	8=7/6*100	9	10=5+7+9	11=10/4*100
2	0	0	2	0	0		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	42 Paket	3 Paket	6 Paket	6 Paket	100,00	6 Paket	6 Paket	100,00
2	0	0	2	0	0		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	9 Dokumen	9 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	100,00	9 Dokumen	9 Dokumen	100,00
2	0	0	2	0	0		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	342 Laporan	50 Laporan	50 Laporan	50 Laporan	100,00	50 Laporan	50 Laporan	100,00
2	0	0	2	0			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00	100 %	100 %	100,00
2	0	0	2	0	0		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan	75 Unit	0 Unit	15 Unit	0 Unit	0,00	15 Unit	15 Unit	100,00
2	0	0	2	0	0		Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	300 Unit	0 Unit	47 Unit	0 Unit	0,00	47 Unit	47 Unit	100,00
2	0	0	2	0	0		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	281 Unit	0 Unit	12 Unit	0 Unit	0,00	12 Unit	12 Unit	100,00
2	0	0	2	0	0		Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	5 Unit	0 Unit	1 Unit	0 Unit	0,00	1 Unit	1 Unit	100,00
2	0	0	2	0	0		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	21 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	100,00	3 Unit	3 Unit	100,00

Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
											Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisa si (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1							2	3	4	5	6	7	8=7/6*100	9	10=5+7+9	11=10/4*100
2	0	0	2	0			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00	100 %	100 %	100,00
2	0	0	2	0	0	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	84 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100,00	12 Laporan	12 Laporan	100,00
2	0	0	2	0	0	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	252 Laporan	36 Laporan	36 Laporan	36 Laporan	100,00	36 Laporan	36 Laporan	100,00
2	0	0	2	0	0	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	420 Laporan	60 Laporan	60 Laporan	45 Laporan	75,00	60 Laporan	60 Laporan	100,00
2	0	0	2	0			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00	100 %	100 %	100,00
2	0	0	2	0	0	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100,00	1 Unit	1 Unit	100,00
2	0	0	2	0	0	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	61 Unit	32 Unit	23 Unit	22 Unit	95,65	60 Unit	60 Unit	100,00

Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
											Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1							2	3	4	5	6	7	8=7/6*100	9	10=5+7+9	11=10/4*100
2	0	0	2	0	0		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	258 Unit	14 Unit	17 Unit	16 Unit	94,12	106 Unit	106 Unit	100,00
2	0	0	2	0	0		Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	5 Unit	0 Unit	1 Unit	0 Unit	0,00	1 Unit	1 Unit	100,00
2	0	0	2	0	0		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	0 Unit	12 Unit	0 Unit	0,00	12 Unit	12 Unit	100,00
2	0	0					PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah 2. Persentase Kelembagaan PUG aktif	1. 18,55 2. 96,15 %	1. 11,27 2. 92,31 %	1. 13,14 2. 93,85 %	1. 13,14 2. 93,85 %	100,00	1. 14,98 2. 94,62 %	1. 14,98 2. 94,62 %	100,00
2	0	0	2	0			Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah regulasi tentang Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang disusun	132 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
2	0	0	2	0	0		Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00

Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
											Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisa si (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1							2	3	4	5	6	7	8=7/6*100	9	10=5+7+9	11=10/4*100
2	0	0	2	0	0		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	230 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
2	0	0	2	0	0		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Perangkat Daerah	0 Perangkat Daerah	1 Perangkat Daerah	1 Perangkat Daerah	100,00	1 Perangkat Daerah	1 Perangkat Daerah	100,00
2	0	0	2	0	0		Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Perangkat Daerah	0 Perangkat Daerah	1 Perangkat Daerah	0 Perangkat Daerah	0,00	1 Perangkat Daerah	1 Perangkat Daerah	100,00

Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
											Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1							2	3	4	5	6	7	8=7/6*100	9	10=5+7+9	11=10/4*100
2	0	0	2	0	2		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100,00	100 Orang	100 Orang	100,00
2	0	0	2	0	2	0	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	14 Dokumen	1 Organisasi	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
2	0	0	2	0	2	0	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	7 Organisasi	1 Kali Kegiatan	1 Organisasi	1 Organisasi	100,00	1 Organisasi	1 Organisasi	100,00
2	0	0	2	0	3		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang mendapatkan penguatan dan pengembangan	9 Lembaga	0 Lembaga	1 Lembaga	0 Lembaga	0,00	1 Lembaga	1 Lembaga	100,00

Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
											Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisa si (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1							2	3	4	5	6	7	8=7/6*100	9	10=5+7+9	11=10/4*100
2	0	0	2	0	0		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	9 Lembaga	0 Lembaga	1 Lembaga	0 Lembaga	0,00	1 Lembaga	1 Lembaga	100,00
2	0	0	2	0	0		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	15 Orang	0 Orang	3 Orang	0 Orang	0,00	3 Orang	3 Orang	100,00
2	0	0	2	0	0		Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Dokumen	0 Dokumen	2 Dokumen	0 Dokumen	0,00	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00
2	0	0					PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase perempuan korban kekerasan yang terlayani sesuai dengan standar	90 %	0 %	84 %	84 %	100,00	85 %	85 %	100,00
2	0	0	2	0			Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan perlindungan perempuan dari segala bentuk kekerasan yang dilaksanakan	7 Regulasi (Perda/Perbu p)	0 Regulasi (Perda/Perbu p)	1 Regulasi (Perda/Perbu p)	0 Regulasi (Perda/Perbu p)	0,00	1 Regulasi (Perda/Perbu p)	1 Regulasi (Perda/Perbu p)	100,00

Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan							
											Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)						
1							2	3	4	5	6	7	8=7/6*100	9	10=5+7+9	11=10/4*100						
2	08	03	2	01	01		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	7	Dokumen	0	Dokumen	1	Dokumen	0	Dokumen	0,00	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00
2	08	03	2	01	02		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	13	Perangkat Daerah	0	Perangkat Daerah	1	Perangkat Daerah	0	Perangkat Daerah	0,00	1	Perangkat Daerah	1	Perangkat Daerah	100,00
2	08	03	2	02			Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang tersedia	13	Kasus	0	Kasus	2	Kasus	2	Kasus	100,00	2	Kasus	2	Kasus	100,00
2	08	03	2	02	01		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	15	Orang	0	Orang	2	Orang	0	Orang	0,00	3	Orang	3	Orang	100,00

Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
											Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1							2	3	4	5	6	7	8=7/6*100	9	10=5+7+9	11=10/4*100
2	0	0	2	0	0		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Layanan	0 Layanan	2 Layanan	2 Layanan	100,00	3 Layanan	3 Layanan	100,00
2	0	0	2	0	3		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan penguatan dan pengembangan	1 Lembaga	0 Lembaga	1 Lembaga	0 Lembaga	0,00	1 Lembaga	1 Lembaga	100,00
2	0	0	2	0	3	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	0,00	1 Laporan	1 Laporan	100,00
2	0	0	2	0	3	2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	7 Orang	0 Orang	1 Orang	0 Orang	0,00	1 Orang	1 Orang	100,00

Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
											Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1							2	3	4	5	6	7	8=7/6*100	9	10=5+7+9	11=10/4*100
2	0	0	2	0	0		Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	20 Orang	0 Orang	4 Orang	0 Orang	0,00	4 Orang	4 Orang	100,00
2	0	0	2	0	0		Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
2	0	0					PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		100 %	20 %	40 %	40 %	100,00	60 %	60 %	100,00
2	0	0	2	0			Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PEKKA yang mendapatkan pelatihan	7 Kelompok	1 Kelompok	1 Kelompok	1 Kelompok	100,00	1 Kelompok	1 Kelompok	100,00
2	0	0	2	0	0		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	9 Perangkat Daerah	0 Perangkat Daerah	1 Perangkat Daerah	0 Perangkat Daerah	0,00	1 Perangkat Daerah	1 Perangkat Daerah	100,00

Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
											Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisa si (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1							2	3	4	5	6	7	8=7/6*100	9	10=5+7+9	11=10/4*100
2	0	0	2	0	0		Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	62 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50,00	12 Laporan	12 Laporan	100,00
2	0	0					PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Sistem Data Gender dan Anak yang terkelola dan valid	80 %	0 %	65 %	0 %	0,00	70 %	70 %	100,00
2	0	0	2	0			Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data gender dan anak yang tersusun	5 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
2	0	0	2	0	0		Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	5 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
2	0	0	2	0	0		Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00

Kode								Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
												Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1								2	3	4	5	6	7	8=7/6*100	9	10=5+7+9	11=10/4*100
2	08	06					PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	1. Persentase pemenuhan kelompok hak anak	100 %	0 %	100 %	0 %	0,00	100 %	100 %	100,00	
								2. Nilai Kabupaten/Kota Layak Anak	Nindy a (700-800) Nilai	Mady a (600-700) Nilai	Mady a (600-700) Nilai	Mady a (600-700) Nilai	100,00	Mady a (600-700) Nilai	Mady a (600-700) Nilai	100,00	
2	08	06	2	01			Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pelebagaan PHA yang terbentuk	7 Lembaga	0 Lembaga	1 Lembaga	0 Lembaga	0,00	1 Lembaga	1 Lembaga	100,00	
2	08	06	2	01	01		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	21 Organisasi	0 Organisasi	1 Organisasi	0 Organisasi	0,00	1 Organisasi	1 Organisasi	100,00	
2	08	06	2	01	02		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	

Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
											Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1							2	3	4	5	6	7	8=7/6*100	9	10=5+7+9	11=10/4*100
2	0	0	2	0			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak yang mendapatkan penguatan dan pengembangan	9 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	100,00	1 Lembaga	1 Lembaga	100,00
2	0	0	2	0	0	1	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	263 Orang	0 Orang	5 Orang	5 Orang	100,00	116 Orang	116 Orang	100,00
2	0	0	2	0	0	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	35 Dokumen	0 Dokumen	5 Dokumen	0 Dokumen	0,00	5 Dokumen	5 Dokumen	100,00
2	0	0	2	0	0	3	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	0 Dokumen	2 Dokumen	0 Dokumen	0,00	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00

Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
											Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisa si (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1							2	3	4	5	6	7	8=7/6*100	9	10=5+7+9	11=10/4*100
2	0	0	2	0	0		Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	7 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
2	0	0					PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase penurunan kekerasan terhadap anak	10 %	0 %	16 %	12 %	75,00	14 %	14 %	100,00
2	0	0	2	0			Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang terlibat dalam pencegahan kekerasan terhadap anak	11 Lembaga	0 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	100,00	1 Lembaga	1 Lembaga	100,00
2	0	0	2	0	0		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	24 Perangkat Daerah	0 Perangkat Daerah	2 Perangkat Daerah	2 Perangkat Daerah	100,00	4 Perangkat Daerah	4 Perangkat Daerah	100,00

Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan							
											Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisa si (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)						
1							2	3	4	5	6	7	8=7/6*100	9	10=5+7+9	11=10/4*100						
2	08	07	2	01	02		Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	24	Dokumen	0	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	100,00	4	Dokumen	4	Dokumen	100,00
2	08	07	2	02			Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang tersedia	10	Lembaga	0	Lembaga	1	Lembaga	0	Lembaga	0,00	1	Lembaga	1	Lembaga	100,00
2	08	07	2	02	01		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	10	Orang	0	Orang	2	Orang	0	Orang	0,00	2	Orang	2	Orang	100,00
2	08	07	2	03			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan bagi anak yang mendapatkan penguatan dan pengembangan	10	Lembaga	0	Lembaga	1	Lembaga	0	Lembaga	0,00	1	Lembaga	1	Lembaga	100,00

Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
											Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisa si (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1							2	3	4	5	6	7	8=7/6*100	9	10=5+7+9	11=10/4*100
2	0	0	2	0	0		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	0,00	1 Laporan	1 Laporan	100,00
2	0	0	2	0	0		Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
2	1	4					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA									

Kode								Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
												Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisa si (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1								2	3	4	5	6	7	8=7/6*100	9	10=5+7+9	11=10/4*100
2	1	4	0	2				PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	1. Persentase laporan pengendalian lapangan tingkat kecamatan sistem informasi kependudukan dan keluarga (SIGA)	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00	100 %	100 %	100,00
									2. Validitas data keluarga beresiko stunting	100 %	100 %	100 %	0 %	0,00	100 %	100 %	100,00
2	1	4	0	2	2	0	1	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah koordinasi Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk yang dilaksanakan	5 Kali Kegiatan	0 Kali Kegiatan	1 Kali Kegiatan	1 Kali Kegiatan	100,00	1 Kali Kegiatan	1 Kali Kegiatan	100,00
2	1	4	0	2	2	0	1	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah Dokumen Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	5 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
2	1	4	0	2	2	0	1	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Non Formal	5 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00

Kode							Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan						
											Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisa si (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)					
1							2	3	4	5	6	7	8=7/6*100	9	10=5+7+9	11=10/4*100					
2	14	02	2	01	07		Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	5	Dokumen	0	Dokumen	1	Dokumen	0	0,00	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00
2	14	02	2	01	08		Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Non Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	5	Dokumen	0	Dokumen	1	Dokumen	0	0,00	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00
2	14	02	2	01	09		Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal	5	Satuan Pendidikan	0	Satuan Pendidikan	1	Satuan Pendidikan	0	0,00	1	Satuan Pendidikan	1	Satuan Pendidikan	100,00
2	14	02	2	01	10		Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Non Formal	5	Laporan	0	Laporan	1	Laporan	1	100,00	1	Laporan	1	Laporan	100,00

Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
											Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisa si (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1							2	3	4	5	6	7	8=7/6*100	9	10=5+7+9	11=10/4*100
2	1	0	2	0	1	1	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	5 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
2	1	0	2	0	1	2	Advokasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	5 Organisasi	0 Organisasi	1 Organisasi	0 Organisasi	0,00	1 Organisasi	1 Organisasi	100,00
2	1	0	2	0	1	3	Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	5 Organisasi	0 Organisasi	1 Organisasi	0 Organisasi	0,00	1 Organisasi	1 Organisasi	100,00
2	1	0	2	0	1	4	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah Laporan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	5 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	0,00	1 Laporan	1 Laporan	100,00

Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan							
											Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisa si (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)						
1							2	3	4	5	6	7	8=7/6*100	9	10=5+7+9	11=10/4*100						
2	14	02	2	01	15		Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	5	Laporan	0	Laporan	1	Laporan	0	Laporan	0,00	1	Laporan	1	Laporan	100,00
2	14	02	2	02			Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1. Jumlah dokumen pemetaan pengendalian penduduk cakupan daerah yang disusun	5	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00
								2. Jumlah dokumen data keluarga beresiko stunting	10	Dokumen	1	Dokumen	2	Dokumen	0	Dokumen	0,00	2	Dokumen	2	Dokumen	100,00
2	14	02	2	02	08		Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang Dibentuk	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang Dibentuk	12	Unit	1	Unit	1	Unit	1	Unit	100,00	4	Unit	4	Unit	100,00
2	14	02	2	02	09		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	10	Laporan	0	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	100,00	4	Laporan	4	Laporan	100,00

Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan							
											Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)						
1							2	3	4	5	6	7	8=7/6*100	9	10=5+7+9	11=10/4*100						
2	14	02	2	02	11		Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	1. Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	18	okumen	0	okumen	1	Dokumen	0	Dokumen	0,00	2	Dokumen	2	Dokumen	100,00
								2. Jumlah dokumen data keluarga beresiko stunting tingkat RT	15980	Dokumen	3196	Dokumen	3196	Dokumen	0	Dokumen	0,00	3196	Dokumen	3196	Dokumen	100,00
2	14	02	2	02	12		Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	17	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100,00	1	Laporan	1	Laporan	100,00
2	14	02	2	02	13		Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	72	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	100,00	12	Dokumen	12	Dokumen	100,00
2	14	02	2	02	14		Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan	6	Laporan	0	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100,00	1	Laporan	1	Laporan	100,00
2	14	03					PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	1. Prevalensi peserta KB aktif	75,84	%	75,64	%	75,69	%	75,69	%	100,00	75,74	%	75,74	%	100,00
								2. Persentase peningkatan pemahaman tentang stunting	75	%	75	%	75	%	75	%	100,00	75	%	75	%	100,00
2	14	03	2	01			Pelaksanaan advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	1. Jumlah kegiatan advokasi, KIE, pengendalian penduduk dan KB yang dilaksanakan	17	Kali Kegiatan	2	Kali Kegiatan	2	Kali Kegiatan	2	Kali Kegiatan	100,00	2	Kali Kegiatan	2	Kali Kegiatan	100,00
								2. Jumlah kali rakor tentang stunting tingkat kecamatan	60	Kali Kegiatan	12	Kali Kegiatan	12	Kali Kegiatan	12	Kali Kegiatan	100,00	12	Kali Kegiatan	12	Kali Kegiatan	100,00

Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
											Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1							2	3	4	5	6	7	8=7/6*100	9	10=5+7+9	11=10/4*100
2	1	0	2	0	0		Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	4 Organisasi	4 Organisasi	4 Organisasi	4 Organisasi	100,00	4 Organisasi	4 Organisasi	100,00
2	1	0	2	0	0		Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
2	1	0	2	0	0		Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	63 Unit	0 Unit	1 Unit	0 Unit	0	1 Unit	1 Unit	100,00

Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
											Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisa si (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1							2	3	4	5	6	7	8=7/6*100	9	10=5+7+9	11=10/4*100
2	1	0	2	0	0		Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100,00	4 Dokumen	4 Dokumen	100,00
2	1	0	2	0	0		Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan Program KKBPK	Jumlah media yang digunakan dalam pencitraan program KKBPK	24 Jenis	0 Jenis	4 Jenis	0 Jenis	0	4 Jenis	4 Jenis	100,00
2	1	0	2	0	0		Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	1. Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	62 Laporan	0 Laporan	2 Laporan	0 Laporan	0	12 Laporan	12 Laporan	100,00
								2. Jumlah peserta rakor tentang stunting tingkat kecamatan	1560 Orang	1560 Orang	1560 Orang	1560 Orang	100,00	1560 Orang	1560 Orang	100,00

Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan							
											Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisa si (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)						
1							2	3	4	5	6	7	8=7/6*100	9	10=5+7+9	11=10/4*100						
2	14	03	2	01	07		Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	72	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100,00	12	Laporan	12	Laporan	100,00		
2	14	03	2	01	08		Pengendalian Program KKBPK	1. Jumlah Petugas pengelola bangsa kencana yang terkelola dan melakukan pengendalian program KKBPK	84	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	8	Laporan	66,67	12	Laporan	12	Laporan	100,00
								2. Jumlah TPK (Tim Pendamping Keluarga) yang di audit	320	Orang	320	Orang	320	Orang	320	Orang	100,00	320	Orang	320	Orang	100,00
2	14	03	2	02			Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah PKB/PLKB yang didayagunakan	63	Orang	63	Orang	63	Orang	100,00	63	Orang	63	Orang	100,00		
2	14	03	2	02	01		Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	4	Organisasi	0	Organisasi	4	Organisasi	4	Organisasi	100,00	4	Organisasi	4	Organisasi	100,00

Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
											Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisa si (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1							2	3	4	5	6	7	8=7/6*100	9	10=5+7+9	11=10/4*100
2	1	0	2	0	0		Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	24 Unit	0 Unit	1 Unit	0 Unit	0,00	1 Unit	1 Unit	100,00
2	1	0	2	0	0		Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyulu h Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	72 Laporan	0 Laporan	12 Laporan	0 Laporan	0,00	12 Laporan	12 Laporan	100,00
2	1	0	2	0	0		Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1123 Orang	1123 Orang	1123 Orang	1123 Orang	100,00	1123 Orang	1123 Orang	100,00
2	1	0	2	0			Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah distribusi alat dan obat kontrasepsi ke fasilitas pelayanan kesehatan	2064 Kali Kegiatan	366 Kali Kegiatan	336 Kali Kegiatan	336 Kali Kegiatan	100,00	336 Kali Kegiatan	336 Kali Kegiatan	100,00

Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
											Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1							2	3	4	5	6	7	8=7/6*100	9	10=5+7+9	11=10/4*100				
2	1	0	2	0	0		Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	72	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100,00	12	Laporan	12	Laporan	100,00
2	1	0	2	0	0		Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Akseptor yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	16	Orang	0	Orang	2	Orang	0,00	2	Orang	2	Orang	100,00
2	1	0	2	0	0		Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	32867	Orang	1817	Orang	1749	Orang	124,07	1831	Orang	1831	Orang	100,00
2	1	0	2	0	0		Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	72	Laporan	0	Laporan	12	Laporan	0,00	12	Laporan	12	Laporan	100,00
2	1	0	2	0	0		Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	72	Dokumen	0	Dokumen	12	Dokumen	0,00	12	Dokumen	12	Dokumen	100,00

Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
											Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisa si (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1							2	3	4	5	6	7	8=7/6*100	9	10=5+7+9	11=10/4*100
2	1	0	2	0	0		Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	37 Unit	10 Unit	7 Unit	0 Unit	0,00	1 Unit	1 Unit	100,00
2	1	0	2	0	0		Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	1787 Orang	0 Orang	20 Orang	0 Orang	0,00	20 Orang	20 Orang	100,00
2	1	0	2	0	0		Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringsnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringsnya	72 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100,00	12 Laporan	12 Laporan	100,00
2	1	0	2	0	0		Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	1787 Orang	0 Orang	20 Orang	0 Orang	0,00	20 Orang	20 Orang	100,00
2	1	0	2	0	1		Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	86 Orang	0 Orang	5 Orang	0 Orang	0,00	5 Orang	5 Orang	100,00

Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
											Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisa si (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1							2	3	4	5	6	7	8=7/6*100	9	10=5+7+9	11=10/4*100
2	1	0	2	0	1		Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	17 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	0,00	1 Laporan	1 Laporan	100,00
2	1	0	2	0			Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah kampung KB yang mendapat pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB	31 Kampung KB	31 Kampung KB	31 Kampung KB	31 Kampung KB	100,00	31 Kampung KB	31 Kampung KB	100,00
2	1	0	2	0	0		Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	4 Organisasi	0 Organisasi	4 Organisasi	0 Organisasi	0,00	4 Organisasi	4 Organisasi	100,00
2	1	0	2	0	0		Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	72 Dokumen	0 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100,00	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00

Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
											Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisa si (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1							2	3	4	5	6	7	8=7/6*100	9	10=5+7+9	11=10/4*100
2	1	0	2	0	0		Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBP di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	31 Kampung	31 Kampung	31 Kampung	31 Kampung	100,00	31 Kampung	31 Kampung	100,00
2	1	0	2	0	0		Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	72 Laporan	0 Laporan	12 Laporan	0 Laporan	0,00	12 Laporan	12 Laporan	100,00
2	1	0					PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1. Persentase peningkatan pemberdayaan Keluarga Sejahtera	80,02 %	76,02 %	77,02 %	77,02 %	100,00	78,02 %	78,02 %	100,00
								2. Persentase peningkatan pemahaman tentang stunting bagi calon pengantin/calon PUS, Ibu Hamil dan Ibu pasca persalinan	75 %	75 %	75 %	75 %	100,00	75 %	75 %	100,00
2	1	0	2	0	1		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1. Jumlah kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang dibina	5 Kelompok	2 Kelompok	2 Kelompok	2 Kelompok	100,00	2 Kelompok	2 Kelompok	100,00
								2. Jumlah pembinaan tentang stunting yang dilaksanakan	60 Kali Kegiatan	12 Kali Kegiatan	12 Kali Kegiatan	12 Kali Kegiatan	100,00	12 Kali Kegiatan	12 Kali Kegiatan	100,00

Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
											Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisa si (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1							2	3	4	5	6	7	8=7/6*100	9	10=5+7+9	11=10/4*100
2	1	0	2	0	0		Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	120 Unit	39 Unit	30 Unit	30 Unit	100,00	20 Unit	20 Unit	100,00
2	1	0	2	0	0		Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1. Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	500 Orang	0 Orang	100 Orang	0 Orang	0,00	0 Orang	0 Orang	0,00
								2. Jumlah sasaran pembinaan stunting	13500 Orang	13500 Orang	13500 Orang	13500 Orang	100,00	13500 Orang	13500 Orang	100,00
2	1	0	2	0	0		Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	10 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100,00	2 Laporan	2 Laporan	100,00

Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan							
											Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisa si (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)						
1							2	3	4	5	6	7	8=7/6*100	9	10=5+7+9	11=10/4*100						
2	1	0	2	0	1	0	Penyediaan dan Pengembangan Materi IPK	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	1	Dokumen	0	Dokumen	1	Dokumen	0	Dokumen	0,00	0	Dokumen	0	Dokumen	0,00
2	1	0	2	0	1	1	Advokasi dan Promosi IPK	Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	30	Orang	0	Orang	30	Orang	0	Orang	0,00	30	Orang	30	Orang	100,00
2	1	0	2	0	2		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	5	Kelompok	0	Kelompok	5	Kelompok	0	Kelompok	0,00	5	Kelompok	5	Kelompok	100,00
2	1	0	2	0	2	0	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	20	Laporan	0	Laporan	4	Laporan	0	Laporan	0,00	4	Laporan	4	Laporan	100,00

Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
											Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisa si (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1							2	3	4	5	6	7	8=7/6*100	9	10=5+7+9	11=10/4*100
2	1	0	2	0	0		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	20 Organisasi	0 Organisasi	4 Organisasi	0 Organisasi	0,00	4 Organisasi	4 Organisasi	100,00
2	1	0	2	0	0		Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	20 Laporan	0 Laporan	4 Laporan	0 Laporan	0,00	4 Laporan	4 Laporan	100,00

Berdasarkan hasil evaluasi Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja DKBP3A dan Pencapaian Renstra DKBP3A s/d Tahun 2024 diatas dapat ditarik kesimpulan yakni :

1. Rata-rata capaian kinerja berdasarkan laporan Triwulan II untuk seluruh Program pada Tahun Anggaran 2024 DKBP3A sebesar 31,25%.
2. Sedangkan untuk rata-rata capaian keuangan berdasarkan laporan Triwulan II untuk seluruh Program pada Tahun Anggaran 2024 DKBP3A sebesar 36,76%
3. Adapun penyebab rendahnya rata-rata capaian kinerja dan keuangan dikarenakan adanya kebijakan bahwa pencairan anggaran hanya diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang bersifat rutin dan selaras dengan kebijakan Pemerintah Daerah.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

SKPD DKBP3A Kabupaten Pangandaran telah melaksanakan program / kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya. Adapun seluruh capaian kinerja yang diuraikan dalam capaian sasaran strategis dan hasil pengukuran Indikator Kinerja Kunci (IKK) dapat dilihat diform sebagai berikut (T-C 30):

Pencapaian Kinerja Pelayanan DKBP3A
Kab. Pangandaran

No .	Indikator	SPM/ Standar Nasion al	IKK		Target Renstra Perangkat Daerah										Realisasi Capaian						Proyeksi						Catata n Analisi s
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15)		(16)
1	Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	-	100	%	80	%	80	%	85	%	90	%	95	%	80	%	80	%	85	%	90	%	95	%	100	%	-
2	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	-	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	-
3	Persentase peningkatan kompetensi aparatur	-	100	%	80	%	80	%	85	%	90	%	95	%	80	%	80	%	85	%	90	%	95	%	100	%	-
4	Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	-	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	-
5	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	-	18,55	%	11,27	%	11,27	%	13,14	%	14,98	%	16,79	%	9,48	%	11,27	%	13,14	%	14,98	%	16,79	%	18,55 %	%	-
6	Persentase Kelembagaan PUG aktif	-	96,15	%	92,31	%	92,31	%	93,85	%	94,62	%	95,38	%	90	%	92,31	%	93,85	%	94,62	%	95,38	%	96,15	%	
7	Persentase perempuan korban kekerasan yang terlayani sesuai dengan standar	-	90	%	83	%	83	%	84	%	85	%	88	%	83	%	0	%	84	%	85	%	88	%	90	%	-
8	Persentase kemandirian PEKKA (Perempuan Kepala Keluarga)	-	100	%	100	%	20	%	40	%	60	%	80	%	0	%	20	%	40	%	60	%	80	%	100	%	-
9	Persentase Sistem Data Gender dan Anak yang terkelola dan valid	-	80	%	0	%	60	%	65	%	70	%	75	%	0	%	0	%	0	%	70	%	75	%	80	%	-
10	Persentase pemenuhan kelompok hak anak	-	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	51,16	%	100	%	100	%	100	%	-

No .	Indikator	SPM/ Standar Nasion al	IKK		Target Renstra Perangkat Daerah										Realisasi Capaian						Proyeksi						Catata n Analisi s
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15)		(16)
11	Nilai Kabupaten/Kota Layak Anak	-	Nindya (700-800)	Nilai	Pratama (500-600)	Nilai	Pratama (500-600)	Nilai	Madya (600-700)	Nilai	Madya (600-700)	Nilai	Nindya (700-800)	Nilai	Madya (600-700)	Nilai	Madya (600-700)	Nilai	Madya (600-700)	Nilai	Madya (600-700)	Nilai	Nindya (700-800)	Nilai	Nindya (700-800)	Nilai	-
12	Persentase penurunan kekerasan terhadap anak	-	10	%	0	%	18	%	16	%	14	%	12	%	0	%	0	%	12	%	14	%	12	%	10	%	-
13	Persentase laporan pengendalian lapangan tingkat kecamatan sistem informasi kependudukan dan keluarga (SIGA)	-	100	%	0	%	100	%	100	%	100	%	100	%	0	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	-
14	Validitas data keluarga beresiko stunting	-	100	%	0	%	100	%	100	%	100	%	100	%	0	%	100	%	0	%	100	%	100	%	100	%	-
15	Prevalensi peserta KB aktif	-	75,84	%	75,64	%	75,64	%	75,69	%	75,74	%	75,79	%	64,46	%	75,64	%	56,77	%	75,74	%	75,79	%	75,84	%	-
16	Persentase peningkatan pemahaman tentang stunting	-	75	%	0	%	75	%	75	%	75	%	75	%	0	%	75	%	75	%	75	%	75	%	75	%	-
17	Persentase peningkatan pemberdayaan Keluarga Sejahtera	-	80,02	%	0	%	76,02	%	77,02	%	78,02	%	79,02	%	0	%	76,02	%	77,02	%	78,02	%	79,02	%	80,02	%	-
18	Persentase peningkatan pemahaman tentang stunting bagi calon pengantin/calon PUS, Ibu Hamil dan Ibu pasca persalinan	-	75	%	0	%	75	%	75	%	75	%	75	%	0	%	75	%	75	%	75	%	75	%	75	%	-

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan identifikasi analisis terhadap kinerja pelayanan DKBP3A Kabupaten Pangandaran, permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, capaian program nasional, tantangan dan peluang maka ditentukan isu strategis DKBP3A Kabupaten Pangandaran sebagai berikut:

1. Makin berkurangnya jumlah tenaga PKB/PLKB
2. Kualitas sumber daya manusia (PLKB) belum memadai.
3. Belum berjalannya pola kemitraan secara optimal.
4. Rendahnya kemandirian dalam ber-KB.
5. Masih rendahnya peran serta organisasi perempuan.
6. Mekanisme pencatatan dan pelaporan belum maksimal.
7. Rendahnya pembinaan terhadap kelompok usaha masyarakat.
8. Rendahnya perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan.
9. Masih rendahnya kesertaan pria dalam ber KB.
10. Masih belum terpenuhinya sarana dan prasarana gedung kantor UPTB.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian tingkat kinerja yang dicapai oleh DKBP3A dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program dan kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk DKBP3A berdasarkan RKPD.

RKPD dapat dijabarkan pada tabel berikut ini(TC-31) :

Review Terhadap RKPD Tahun 2025
Kab. Pangandaran

DKBP3A

No.	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Kebutuhan Dana Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	DKBP3A					9.849.990.453						9.934.147.000	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					5.343.367.164	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					4.167.681.122	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi 2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik 3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur 4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	1. 95 2. 100 3. 95 4. 100	%	4.519.367.708	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi 2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik 3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur 4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	1. 95 2. 100 3. 95 4. 100	%	3.635.020.584	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1. Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu 2. Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu 3. Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	1. 100 2. 100 3. 100	%	84.400.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1. Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu 2. Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu 3. Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	1. 100 2. 100 3. 100	%	10.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Kebutuhan Dana Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DKBP3A	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen	74.400.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DKBP3A	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	Dokumen	0	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DKBP3A	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	Laporan	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DKBP3A	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	Laporan	10.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik	100	%	2.725.575.327	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik	100	%	2.680.576.974	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DKBP3A	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23	Orang/Bulan	2.675.575.327	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DKBP3A	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23	Orang/Bulan	2.675.576.974	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DKBP3A	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	14	Dokumen	45.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DKBP3A	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0	Dokumen	0	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DKBP3A	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DKBP3A	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	5.000.000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik	32 dan 410	Jenis dan Unit/Buah	45.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik	0	Jenis dan Unit/Buah	0	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	DKBP3A	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	Laporan	45.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	DKBP3A	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0	Laporan	0	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang baik	100	%	175.400.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang baik	100	%	36.800.000	

No.	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Kebutuhan Dana Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	DKBP3A	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	104	Paket	50.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	DKBP3A	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	120	Paket	36.800.000	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	DKBP3A	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	24	Dokumen	80.400.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	DKBP3A	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	0	Dokumen	0	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	DKBP3A	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5	Orang	15.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	DKBP3A	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0	Orang	0	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	DKBP3A	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100	Orang	15.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	DKBP3A	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0	Orang	0	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	DKBP3A	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100	Orang	15.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	DKBP3A	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	Orang	0	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik	100	%	478.809.120	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik	100	%	173.925.505	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DKBP3A	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6	Paket	10.328.800	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DKBP3A	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6	Paket	6.564.615	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DKBP3A	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50	Paket	200.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DKBP3A	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50	Paket	49.742.197	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DKBP3A	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	28	Paket	158.310.320	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DKBP3A	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	28	Paket	13.505.586	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DKBP3A	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6	Paket	17.050.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DKBP3A	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6	Paket	11.675.091	

No.	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Kebutuhan Dana Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	DKBP3A	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	9	Dokumen	14.520.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	DKBP3A	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	9	Dokumen	13.838.016	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DKBP3A	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50	Laporan	78.600.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DKBP3A	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50	Laporan	78.600.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi	100	%	487.808.261	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi	100	%	277.886.740	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DKBP3A	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	15	Unit	108.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DKBP3A	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	Unit	0	
	Pengadaan Mebel	DKBP3A	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	47	Unit	48.903.515	Pengadaan Mebel	DKBP3A	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	16	Unit	14.800.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DKBP3A	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12	Unit	141.904.746	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DKBP3A	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	19	Unit	123.086.740	
	Pengadaan Aset Tak Berwujud	DKBP3A	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1	Unit	45.000.000	Pengadaan Aset Tak Berwujud	DKBP3A	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	0	Unit	0	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DKBP3A	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3	Unit	144.000.000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DKBP3A	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3	Unit	140.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	100	%	252.840.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	100	%	387.234.865	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DKBP3A	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	7.700.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DKBP3A	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	5.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DKBP3A	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	Laporan	33.340.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DKBP3A	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	Laporan	33.298.865	

No.	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Kebutuhan Dana Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DKBP3A	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	Laporan	211.800.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DKBP3A	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	Laporan	348.936.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi	100	%	269.535.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi	100	%	68.596.500	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DKBP3A	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit	31.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DKBP3A	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit	31.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DKBP3A	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	60	Unit	22.596.500	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DKBP3A	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	60	Unit	22.596.500	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DKBP3A	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	106	Unit	29.738.500	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DKBP3A	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	106	Unit	15.000.000	
	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	DKBP3A	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1	Unit	20.000.000	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	DKBP3A	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	0	Unit	0	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DKBP3A	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12	Unit	166.200.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DKBP3A	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	Unit	0	
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		1. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	1. 16,79	%	209.900.000	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		1. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	1. 16,79	%	134.300.000	
			2. Persentase Kelembagaan PUG aktif	2. 95,38	%	59.398.496			2. Persentase Kelembagaan PUG aktif	2. 95,38	%	44.548.784	
	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah regulasi tentang Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang disusun	1	Dokumen	59.398.496	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah regulasi tentang Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang disusun	1	Dokumen	44.548.784	

No.	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Kebutuhan Dana Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Dokumen	14.849.690	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Dokumen	14.849.680	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Dokumen	14.849.402	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG	1	Laporan	14.849.402	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Kab. Pangandaran	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Perangkat Daerah	14.849.702	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Kab. Pangandaran	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	0	Perangkat Daerah	0	
	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Kab. Pangandaran	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Perangkat Daerah	14.849.702	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Kab. Pangandaran	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kab/Kota	100	Orang	14.849.702	

No.	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Kebutuhan Dana Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	100	Orang	181.700.000	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	100	Orang	134.300.000	
	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Dokumen	134.300.000	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Dokumen	134.300.000	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kab. Pangandaran	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Organisasi	47.400.000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kab. Pangandaran	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	0	Organisasi	0	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang mendapatkan penguatan dan pengembangan	1	Lembaga	28.200.000	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang mendapatkan penguatan dan pengembangan	0	Lembaga	0	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	1	Lembaga	9.400.000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	0	Lembaga	0	

No.	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Kebutuhan Dana Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	3	Orang	9.400.000	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	0	Orang	0	
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2	Dokumen	9.400.000	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	0	Dokumen	0	
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		Persentase perempuan korban kekerasan yang terlayani sesuai dengan standar	88	%	92.809.440	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		Persentase perempuan korban kekerasan yang terlayani sesuai dengan standar	88	%	26.516.984	
	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah kebijakan perlindungan perempuan dari segala bentuk kekerasan yang dilaksanakan	1	Regulasi (Perda/Perbup)	26.516.984	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah kebijakan perlindungan perempuan dari segala bentuk kekerasan yang dilaksanakan	1	Regulasi (Perda/Perbup)	13.258.492	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Dokumen	13.258.492	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Dokumen	13.258.492	

No.	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Kebutuhan Dana Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Perangkat Daerah	13.258.492	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	0	Perangkat Daerah	0	
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang tersedia	2	Kasus	13.258.492	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang tersedia	2	Kasus	13.258.492	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	2	Layanan	13.258.492	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	2	Layanan	13.258.492	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan penguatan dan pengembangan	1	Lembaga	53.033.964	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan penguatan dan pengembangan	1	Lembaga	0	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Laporan	13.258.491	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	0	Laporan	0	

No.	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Kebutuhan Dana Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	1	Orang	13.258.491	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	0	Orang	0	
	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	4	Orang	13.258.491	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	0	Orang	0	
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Dokumen	13.258.491	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	0	Dokumen	0	
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		Persentase kemandirian PEKKA (Perempuan Kepala Keluarga)	80	%	240.054.720	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		Persentase kemandirian PEKKA (Perempuan Kepala Keluarga)	80	%	204.000.000	
	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah PEKKA yang mendapatkan pelatihan	1	Kelompok	240.054.720	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah PEKKA yang mendapatkan pelatihan	1	Kelompok	204.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Kebutuhan Dana Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Perangkat Daerah	34.027.360	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	0	Perangkat Daerah	0	
	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	12	Laporan	206.027.360	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	12	Dokumen	204.000.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		Persentase Sistem Data Gender dan Anak yang terkelola dan valid	75	%	30.027.360	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		Persentase Sistem Data Gender dan Anak yang terkelola dan valid	0	%	0	
	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen data gender dan anak yang tersusun	1	Dokumen	30.027.360	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen data gender dan anak yang tersusun	0	Dokumen	0	
	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1	Dokumen	18.013.680	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	0	Dokumen	0	
	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Dokumen	12.013.680	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	0	Dokumen	0	
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		1. Persentase pemenuhan kelompok hak anak	100	%	17.901.888	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		1. Persentase pemenuhan kelompok hak anak	0	%	0	
			2. Nilai Kabupaten/Kota Layak Anak	Nindya (700-800)	Nilai	95.552.832			2. Nilai Kabupaten/Kota Layak Anak	Nindya (700-800)	Nilai	56.350.944	

No.	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Kebutuhan Dana Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah pelembagaan PHA yang terbentuk	1	Lembaga	17.901.888	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah pelembagaan PHA yang terbentuk	0	Lembaga	0	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	1	Organisasi	8.950.944	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	0	Organisasi	0	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Dokumen	8.950.944	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	0	Dokumen	0	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak yang mendapatkan penguatan dan pengembangan	1	Lembaga	95.552.832	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak yang mendapatkan penguatan dan pengembangan	1	Lembaga	56.350.944	
	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	5	Orang	8.950.944	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	5	Orang	8.950.944	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	5	Dokumen	30.250.944	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	0	Dokumen	0	

No.	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Kebutuhan Dana Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2	Dokumen	8.950.944	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	0	Dokumen	0	
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Dokumen	47.400.000	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Dokumen	47.400.000	
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		Persentase penurunan kekerasan terhadap anak	12	%	78.354.720	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		Persentase penurunan kekerasan terhadap anak	12	%	66.943.826	
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah lembaga yang terlibat dalam pencegahan kekerasan terhadap anak	1	Lembaga	44.121.888	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah lembaga yang terlibat dalam pencegahan kekerasan terhadap anak	1	Lembaga	32.710.944	
	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Kab. Pangandaran	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2	Perangkat Daerah	32.710.944	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Kab. Pangandaran	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan pencegahan KTA	2	Orang	32.710.944	
	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan	Kab. Pangandaran	Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu	2	Kegiatan	11.410.944	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan	Kab. Pangandaran	Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu	0	Kegiatan	0	

No.	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Kebutuhan Dana Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA						kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA						
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang tersedia	1	Lembaga	11.410.944	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang tersedia	1	Lembaga	11.410.944	
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	2	Orang	11.410.944	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	2	Orang	11.410.944	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah lembaga penyedia layanan bagi anak yang mendapatkan penguatan dan pengembangan	1	Lembaga	22.821.888	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah lembaga penyedia layanan bagi anak yang mendapatkan penguatan dan pengembangan	1	Lembaga	22.821.938	
	Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan AMPK tingkat Kabupaten/kota	Kab. Pangandaran	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan AMPK di tingkat Provinsi yang memiliki sarana dan prasarana layanan sesuai standar	1	Lembaga	11.410.944	Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan AMPK tingkat Kabupaten/kota	Kab. Pangandaran	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan AMPK di tingkat Provinsi yang memiliki sarana dan prasarana layanan sesuai standar	1	Lembaga	11.410.994	
	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Kab. Pangandaran	Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK	1	Kegiatan	11.410.944	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Kab. Pangandaran	Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK	1	Kegiatan	11.410.944	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					4.506.623.289	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					5.766.465.878	

No.	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Kebutuhan Dana Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		1. Persentase laporan pengendalian lapangan tingkat kecamatan sistem informasi kependudukan dan keluarga (SIGA)	100	%	318.246.082	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		1. Persentase laporan pengendalian lapangan tingkat kecamatan sistem informasi kependudukan dan keluarga (SIGA)	100	%	313.735.878	
			2. Validitas data keluarga beresiko stunting	100	%	0			2. Validitas data keluarga beresiko stunting	100	%	0	
	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk		Jumlah koordinasi Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk yang dilaksanakan	1	Kali Kegiatan	206.716.070	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk		Jumlah koordinasi Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk yang dilaksanakan	1	Kali Kegiatan	37.857.252	
	Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	1	Kegiatan	18.678.626	Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Kab. Pangandaran	Jumlah Kerjasama Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal yang dilaksanakan	1	Kegiatan	18.678.626	
	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Non Formal	1	Dokumen	18.678.626	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Non Formal	0	Dokumen	0	
	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	1	Dokumen	18.678.626	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	0	Dokumen	0	

No.	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Kebutuhan Dana Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Non Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	1	Dokumen	18.678.626	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Non Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	0	Dokumen	0	
	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Kab. Pangandaran	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal	1	Satuan Pendidikan	19.178.626	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Kab. Pangandaran	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal	0	Satuan Pendidikan	0	
	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Kab. Pangandaran	Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	1	Kegiatan	19.178.626	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Kab. Pangandaran	Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	1	Kegiatan	19.178.626	
	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	Kab. Pangandaran	Jumlah pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	1	Dokumen	18.678.626	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	Kab. Pangandaran	Jumlah pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	0	Dokumen	0	
	Advokasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Kab. Pangandaran	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	1	Organisasi	18.678.626	Advokasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Kab. Pangandaran	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	0	Organisasi	0	

No.	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Kebutuhan Dana Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan	Kab. Pangandaran	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	1	Organisasi	19.178.626	Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan	Kab. Pangandaran	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	0	Organisasi	0	
	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Kab. Pangandaran	Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	1	Kegiatan	18.678.626	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Kab. Pangandaran	Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	0	Kegiatan	0	
	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1	Kegiatan	18.429.810	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	0	Kegiatan	0	
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		1. Jumlah dokumen pemetaan pengendalian penduduk cakupan daerah yang disusun	1	Dokumen	111.530.012	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		1. Jumlah dokumen pemetaan pengendalian penduduk cakupan daerah yang disusun	1	Dokumen	275.878.626	
			2. Jumlah dokumen data keluarga beresiko stunting	2	Dokumen	0			2. Jumlah dokumen data keluarga beresiko stunting	0	Dokumen	0	
	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana di Sektor Lain	Kab. Pangandaran	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	1	Unit	19.678.626	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana di Sektor Lain	Kab. Pangandaran	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	1	Unit	19.678.626	

No.	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Kebutuhan Dana Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	10	Laporan	17.678.626	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	10	Laporan	60.000.000	
	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Kab. Pangandaran	1. Jumlah Data dan Informasi yang Tersedianya	1	Dokumen	16.678.626	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Kab. Pangandaran	1. Jumlah Data dan Informasi yang Tersedianya	0	Dokumen	0	
		Kab. Pangandaran	2. Jumlah dokumen data keluarga beresiko stunting tingkat RT	3196	Dokumen	0		Kab. Pangandaran	2. Jumlah dokumen data keluarga beresiko stunting tingkat RT	0	Dokumen	0	
	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	1	Laporan	21.136.882	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	1	Laporan	76.200.000	
	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	12	Dokumen	17.678.626	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	12	Dokumen	120.000.000	
	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangsa Kencana	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangsa Kencana	1	Laporan	18.678.626	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangsa Kencana	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangsa Kencana	0	Laporan	0	
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		1. Prevalensi peserta KB aktif	75,79	%	3.304.929.357	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		1. Prevalensi peserta KB aktif	75,79	%	3.007.541.000	
			2. Persentase peningkatan pemahaman tentang stunting	75	%	0			2. Persentase peningkatan pemahaman tentang stunting	75	%	0	
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal		1. Jumlah kegiatan advokasi, KIE, pengendalian penduduk dan KB yang dilaksanakan	2	Kali Kegiatan	1.454.907.649	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal		1. Jumlah kegiatan advokasi, KIE, pengendalian penduduk dan KB yang dilaksanakan	2	Kali Kegiatan	1.147.400.000	
			2. Jumlah kali rakor tentang stunting tingkat kecamatan	12	Kali Kegiatan	0			2. Jumlah kali rakor tentang stunting tingkat kecamatan	12	Kali Kegiatan	0	

No.	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Kebutuhan Dana Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Kab. Pangandaran	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	4	Organisasi	51.450.689	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Kab. Pangandaran	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	4	Organisasi	200.000.000	
	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kab. Pangandaran	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	1	Dokumen	17.189.911	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kab. Pangandaran	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	0	Dokumen	0	
	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana	Kab. Pangandaran	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1	Unit	19.736.875	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana	Kab. Pangandaran	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	0	Unit	0	
	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	8	Dokumen	321.112.300	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	8	Dokumen	100.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Kebutuhan Dana Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Kab. Pangandaran	1. Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	12	Laporan	60.498.164	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Kab. Pangandaran	1. Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	12	Laporan	150.000.000	
			2. Jumlah peserta rakor tentang stunting tingkat kecamatan	1560	Orang	0			2. Jumlah peserta rakor tentang stunting tingkat kecamatan	0	Orang	0	
	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	12	Laporan	121.379.157	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	12	Laporan	315.000.000	
	Pengendalian Program KKBPK	Kab. Pangandaran	1. Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	12	Laporan	863.540.553	Pengendalian Program KKBPK	Kab. Pangandaran	1. Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	12	Laporan	382.400.000	
			2. Jumlah TPK (Tim Pendamping Keluarga) yang di audit	320	Orang	0			2. Jumlah TPK (Tim Pendamping Keluarga) yang di audit	0	Orang	0	
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)		Jumlah PKB/PLKB yang didayagunakan	63	Orang	211.677.978	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)		Jumlah PKB/PLKB yang didayagunakan	63	Orang	279.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Kebutuhan Dana Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	4	Laporan	26.738.030	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	0	Laporan	0	
	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Kab. Pangandaran	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	2	Unit	26.021.786	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Kab. Pangandaran	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	0	Unit	0	
	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	12	Laporan	42.947.115	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	0	Laporan	0	
	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kab. Pangandaran	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1123	Orang	115.971.047	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kab. Pangandaran	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1123	Orang	279.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Kebutuhan Dana Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah distribusi alat dan obat kontrasepsi ke fasilitas pelayanan kesehatan	336	Kali Kegiatan	1.064.833.266	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah distribusi alat dan obat kontrasepsi ke fasilitas pelayanan kesehatan	336	Kali Kegiatan	1.088.891.000	
	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12	Laporan	119.725.002	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12	Laporan	8.500.000	
	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kab. Pangandaran	Jumlah Pengelola dan Petugas yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	2	Orang	15.563.140	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kab. Pangandaran	Jumlah Pengelola dan Petugas yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	0	Orang	0	
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kab. Pangandaran	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1868	Orang	586.136.563	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kab. Pangandaran	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1868	Orang	1.067.691.000	
	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	12	Laporan	35.286.348	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	0	Laporan	0	
	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	12	Dokumen	17.237.786	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	0	Dokumen	0	

No.	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Kebutuhan Dana Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kab. Pangandaran	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	1	Unit	141.481.973	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kab. Pangandaran	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	0	Unit	0	
	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Kab. Pangandaran	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	20	Orang	17.458.854	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Kab. Pangandaran	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	0	Orang	0	
	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12	Laporan	37.157.635	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12	Laporan	12.700.000	
	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	Kab. Pangandaran	Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	20	Orang	23.516.241	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	Kab. Pangandaran	Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	0	Orang	0	
	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Kab. Pangandaran	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	5	Orang	47.753.483	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Kab. Pangandaran	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	0	Orang	0	
	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	1	Laporan	23.516.241	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	0	Laporan	0	
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		Jumlah kampung KB yang mendapat pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB	31	Kampung KB	573.510.464	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		Jumlah kampung KB yang mendapat pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB	31	Kampung KB	492.250.000	

No.	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Kebutuhan Dana Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Kab. Pangandaran	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	4	Organisasi	25.775.645	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Kab. Pangandaran	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	0	Organisasi	0	
	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	12	Dokumen	182.578.273	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	12	Dokumen	3.750.000	
	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Kab. Pangandaran	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	31	Kampung	182.578.273	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Kab. Pangandaran	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	31	Kampung	488.500.000	
	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	12	Laporan	182.578.273	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	0	Laporan	0	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		1. Persentase peningkatan pemberdayaan Keluarga Sejahtera	79,02	%	883.447.850	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		1. Persentase peningkatan pemberdayaan Keluarga Sejahtera	79,02	%	2.445.189.000	
			2. Persentase peningkatan pemahaman tentang stunting bagi calon pengantin/calon PUS, Ibu Hamil dan Ibu pasca persalinan	75	%	0			2. Persentase peningkatan pemahaman tentang stunting bagi calon pengantin/calon PUS, Ibu Hamil dan Ibu pasca persalinan	0	%	0	

No.	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Kebutuhan Dana Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		1. Jumlah kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang dibina	2	Kelompok	435.011.972	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		1. Jumlah kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang dibina	2	Kelompok	372.089.000	
			2. Jumlah pembinaan tentang stunting yang dilaksanakan	12	Kali Kegiatan	0			2. Jumlah pembinaan tentang stunting yang dilaksanakan	0	Kali Kegiatan	0	
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	2	Laporan	395.533.346	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	2	Laporan	52.889.000	
							Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Kab. Pangandaran	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	1	Laporan	19.200.000	
							Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Kab. Pangandaran	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	30	Unit	300.000.000	
	Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	1	Laporan	39.478.626	Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	0	Laporan	0	

No.	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Kebutuhan Dana Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Jumlah kelompok kegiatan yang mendapatkan pembinaan tentang 8 fungsi keluarga	5	Kelompok	448.435.878	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Jumlah kelompok kegiatan yang mendapatkan pembinaan tentang 8 fungsi keluarga	5	Kelompok	2.073.100.000	
	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	4	Laporan	164.478.626	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	0	Laporan	0	
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab. Pangandaran	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	4	Organisasi	164.478.626	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab. Pangandaran	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	4	Organisasi	13.000.000	
	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	4	Laporan	119.478.626	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	0	Laporan	0	

No.	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Kebutuhan Dana Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Kab. Pangandaran	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	12	Laporan	981.000.000	
							Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Kab. Pangandaran	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	12	Laporan	1.079.100.000	

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Penelaahan usulan program pada sub bab ini menguraikan kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang merupakan kegiatan jarring aspirasi masyarakat terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun 2025, yang sesuai dengan tugas dan fungsi dari DKBP3A Kabupaten Pangandaran.

Kajian usulan program dan kegiatan merupakan usulan para pemangku kepentingan dari kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat, LSM, dan asosiasi-asosiasi. Informasi tersebut diperoleh melalui penelitian lapangan terhadap keinginan masyarakat dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten.

Penelaahan/review hasil usulan program dan kegiatan dari masyarakat disajikan dalam table berikut (T-C 32) :

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	NIHIL				

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja (Renja) disusun dengan maksud untuk mengarahkan seluruh dimensi kebijakan pembangunan Kabupaten Pangandaran Khususnya urusan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sebagai pedoman taktis dalam penyelenggaraan, pengelolaan serta pelayanan Publik Program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak.

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

a. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan kebijakan nasional untuk menganalisis kebijakan nasional yang akan dilaksanakan di daerah yang mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029, maupun yang dirumuskan dalam RANHIR (), yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional tahun 2025-2029 yang memiliki Tema “**Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)**”, yang diimplementasikan melalui 4 (Empat) Pilar dan merupakan amanat RPJPN 2005-2045. 8 (Delapan) Pilar RPJMN tahun 2025-2029;

1. Reformasi Politik;
2. Reformasi Hukum;
3. Reformasi Tata Kelola Pemerintahan;
4. Transformasi Digital dan Inklusivitas Pelayanan Publik;
5. Reformasi Tata Kelola Keuangan Negara;
6. Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba;
7. Penanggulangan Judi dan Penyelundupan;
8. Penguatan Tata Kelola Badan Usaha Milik Negara

Kedelapan pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 16 (Enam Belas) agenda pembangunan yang didalamnya terdapat program prioritas, kegiatan prioritas, dan proyek prioritas. 16 (Enam Belas) agenda pembangunan tersebut yakni ;

1. Digitalisasi pelayanan publik;

2. Penerapan total reward;
3. Pengelolaan dan audit keuangan partai politik;
4. Penyusunan dasar hukum pembentukan lembaga tunggal pengelola regulasi;
5. Sinkronisasi administrasi kependudukan dan statistik hayati dengan sistem registrasi sosial ekonomi;
6. Peningkatan daya saing Badan Usaha Milik Negara;
7. Peningkatan Efisiensi peran Badan Usaha Milik Negara dalam Penugasan Pemerintah;
8. Ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan perpajakan;
9. Optimalisasi local taxing power;
10. Intensifikasi penerimaan negara bukan pajak;
11. Peningkatan efektivitas belanja pemerintah pusat;
12. Optimalisasi kualitas belanja TKD;
13. Ekstensifikasi dan intensifikasi sumber-sumber pembiayaan inovatif dan berkelanjutan;
14. Pengendalian inflasi pangan bergejolak;
15. Kolaborasi pencegahan penyalahgunaan narkoba; dan
16. Penutupan akses ke situs perjudian online

Sasaran visi pembangunan jangka menengah tahun 2025-2029 adalah mewujudkan Indonesia sebagai negara nusantara berdaulat, maju dan berkelanjutan yang tercermin dalam 5(lima) sasaran visi yaitu Pendapatan Perkapita setara negara maju; kemiskinan menuju 0 (nol) persen dan ketimpangan berkurang; kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat; daya saing sumberdaya meningkat; serta intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) menurun menuju Net Zero Emission.

Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak secara substantif dapat mengimplentasikan salah satu agenda Pembangunan Nasional yakni agenda nomor 4 (empat) yaitu “*Daya Saing Sumberdaya Meningkat*”. Karena melalui Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga serta

Program Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan diharapkan dapat melahirkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter sehingga Sumber Daya Manusia Indonesia mampu menjawab segala bentuk tantangan dimasa yang akan datang.

Berdasarkan 5 (lima) agenda Pembangunan Nasional Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk membangun sumber daya manusia (SDM) melalui;

1. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
2. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
3. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
4. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
5. Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
6. Pengentasan Kemiskinan; dan
7. Peningkatan produktivitas dan daya saing.

b. Telaahan terhadap Kebijakan Provinsi

Kebijakan Pembangunan di Provinsi Jawa Barat 2025 berfokus terhadap 4 hal, yakni:

1. Menerapkan prioritas sesuai dengan arah kebijakan pembangunan, diantaranya yaitu pencapaian target indikator makro pembangunan yang pembangunan yang belum terselesaikan pada tahun 2024, pemantapan ekonomi Jawa Barat setelah dampak pandemi COVID-19, penyelesaian isu-isu komprehensif seperti kemiskinan dan *stunting*, dan penyelesaian isu strategis dan isu kewilayahan;
2. Memastikan konsistensi perencanaan dan penganggaran prioritas dan sasaran prioritas Pembangunan provinsi dengan pendekatan penganggaran berbasis program (*money follow program*), serta program prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2025;
3. Kolaborasi antara berbagai sumber pendanaan, antara lain pendanaan kabupaten/kota (APBD kabupaten/kota), APBD Provinsi

APBN, CSR, KPBU, obligasi daerah, dana Masyarakat/umat, dan hibah, untuk membiayai belanja setiap perangkat daerah;

4. Melibatkan secara aktif pemangku kepentingan diluar pemerintah dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan daerah, dengan penerapan konsep spasial di dalam penjabaran prioritas Pembangunan daerah;

Arah Kebijakan Pembangunan di Kabupaten Pangandaran berdasarkan Prioritas Pembangunan Daerah Kab. Pangandaran Tahun 2025 yang memiliki Tema **“Pusat Cutting-edge industry, inovasi dan Pendidikan STEAM bertaraf global, serta penumpu ketahanan pangan nasional”**,

Prioritas Pembangunan di Provinsi Jawa Barat 2025 tidak lepas dari adanya Isu-isu Strategis yang dijadikan dasar didalam mengidentifikasi arah kebijakan yang ditentukan pada setiap proses tahapan perencanaan tahunan. Adapun yang menjadi isu strategis pada tahun 2024 yakni :

1. Kualitas dan daya saing sumber daya manusia;
2. Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan dan Berkelanjutan;
3. Pemerataan Pembangunan Wilayah yang didukung Infrastruktur Berkualitas dan Lingkungan yang Berkelanjutan; dan
4. Reformasi Birokrasi dan Inovasi Daerah.

c. Telaahan terhadap Kebijakan Kabupaten

Arah Kebijakan Pembangunan di Kabupaten Pangandaran berdasarkan Prioritas Pembangunan Daerah Kab. Pangandaran Tahun 2025 yang memiliki Tema **“Peningkatan Daya Saing Daerah”**, Prioritas Pembangunan Kabupaten Pangandaran Tahun 2025, meliputi:

1. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi untuk Mendongkrak Perekonomian Masyarakat melalui Penguatan Industri Pariwisata sebagai lokomotif Pengembangan UMKM, Peningkatan Iklim Investasi, dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, serta Pembudidaya;
2. Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya;

3. Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Kesehatan;
4. Pembangunan Sosial Budaya Masyarakat yang Tanggap terhadap Bencana;
5. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemerataan Wilayah melalui Penataan Infrastruktur Dasar, Aksesibilitas serta Konektivitas menuju Pusat Kegiatan Strategis;
6. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik

Kegiatan program strategis tersebut saling bersinergi dalam kesatuan proses, dalam upaya peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja DKBP3A selama Satu tahun sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing bidang.

DKBP3A mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Keluarga Berencana, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sesuai azas otonomi dan tugas pembantuan.

DKBP3A melaksanakan tugas dimaksud, menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
2. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
3. Pembinaan dan Pelaksanaan Tugas di Bidang Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemerintahan.
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

- a. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
- b. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan
- Kedua Bidang tersebut memiliki tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Tujuan	Sasaran
Menurunnya laju pertumbuhan penduduk	Meningkatnya Pelayanan Keluarga Berencana

- c. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Sedangkan pada satu bidang ini memiliki tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Tujuan	Sasaran
Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	Pelayanan terhadap korban kekerasan
	Meningkatnya Peranan Perempuan dalam Proses Pembangunan
	Meningkatnya Sumbangan Pendapatan Perempuan

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Perangkat Daerah guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan, diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi, menjawab tantangan pembangunan, serta memaksimalkan peluang yang ada.

Program dan kegiatan DKBP3A Kabupaten Pangandaran yang direncanakan untuk Periode Tahun 2025 dalam form berikut (TC-33):

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan DKBP3A Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kab. Pangandaran

DKBP3A

KODE						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Rp.	Sumber Dana		Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Rp.
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						DKBP3A				9.934.147.000				7.760.939.734
2	08					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				4.167.681.122				4.450.957.321
2	08	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi 2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik 3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur 4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas		1. 95% 2. 100% 3. 95% 4. 100%	3.635.020.584			1. 100% 2. 100% 3. 100% 4. 100%	3.904.367.708
2	08	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu 2. Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu 3. Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	DKBP3A	1. 100% 2. 100% 3. 100%	10.000.000			1. 100% 2. 100% 3. 100%	10.000.000

KODE						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Rp.	Sumber Dana		Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Rp.
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	08	01	2	01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DKBP3A	3 Laporan	10.000.000	APBD II		3 Laporan	10.000.000
2	08	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik		100%	2.680.576.974			100%	2.690.575.327
2	14	01	2	02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	DKBP3A	18 Orang/Bulan	2.675.576.974	APBD II		23 Orang/Bulan	2.685.575.327
2	08	01	2	02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DKBP3A	1 Laporan	5.000.000	APBD II		1 Laporan	5.000.000
2	08	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang baik		100%	36.800.000			100%	50.000.000
2	08	01	2	05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	DKBP3A	120 Paket	36.800.000	APBD II		104 Paket	50.000.000
2	08	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik		100%	173.925.505			100%	482.809.120
2	08	01	2	06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	DKBP3A	6 Paket	6.564.615	APBD II		6 Paket	10.328.800
2	08	01	2	06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	DKBP3A	50 Paket	49.742.197	APBD II		50 Paket	200.000.000
2	08	01	2	06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	DKBP3A	28 Paket	13.505.586	APBD II		28 Paket	158.310.320

KODE						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Rp.	Sumber Dana		Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Rp.
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	08	01	2	06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	DKBP3A	6 Paket	11.675.091	APBD II		6 Paket	17.050.000
2	08	01	2	06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	DKBP3A	9 Dokumen	13.838.016	APBD II		9 Dokumen	14.520.000
2	08	01	2	06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DKBP3A	50 Laporan	78.600.000	APBD II		50 Laporan	82.600.000
2	08	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi		100%	277.886.740			100%	334.808.261
2	08	01	2	07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	DKBP3A	16 Unit	14.800.000	APBD II		47 Unit	48.903.515
2	08	01	2	07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	DKBP3A	19 Unit	123.086.740	APBD II		12 Unit	141.904.746
2	08	01	2	07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	DKBP3A	3 Unit	140.000.000	APBD II		3 Unit	144.000.000
2	08	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan		100%	387.234.865			100%	252.840.000
2	08	01	2	08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DKBP3A	12 Laporan	5.000.000	APBD II		12 Laporan	7.700.000
2	08	01	2	08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	DKBP3A	36 Laporan	33.298.865	APBD II		36 Laporan	33.340.000
2	08	01	2	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	DKBP3A	60 Laporan	348.936.000	APBD II		60 Laporan	211.800.000

KODE						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Rp.	Sumber Dana		Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Rp.
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	08	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi		100%	68.596.500			100%	83.335.000
2	08	01	2	09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	DKBP3A	1 Unit	31.000.000	APBD II		1 Unit	31.000.000
2	08	01	2	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	DKBP3A	60 Unit	22.596.500	APBD II		60 Unit	22.596.500
2	08	01	2	09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	DKBP3A	106 Unit	15.000.000	APBD II		106 Unit	29.738.500
2	08	02				PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah 2. Persentase Kelembagaan PUG aktif		1. 16,79% 2. 95,38%	178.848.784			1. 18,55% 2. 96,15%	180.880.483
2	08	02	2	01		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah regulasi tentang Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang disusun		1 Dokumen	44.548.784			1 Dokumen	44.980.483
2	08	02	2	01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran	1 Dokumen	14.849.680	APBD II		1 Dokumen	14.980.483
2	08	02	2	01	0007	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG	Kab. Pangandaran	1 Laporan	14.849.402	APBD II		1 Laporan	15.000.000

KODE						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Rp.	Sumber Dana		Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Rp.
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	08	02	2	01	0008	Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Jmlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kab/Kota	Kab. Pangandaran	100 Orang	14.849.702	APBD II		100 Orang	15.000.000
2	08	02	2	02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah partisipasi perempuan di lembaga pemerintah		100 orang	134.300.000			100 Orang	135.900.000
2	08	02	2	02	0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran	1 Dokumen	134.300.000	APBD II		1 Dokumen	135.900.000
2	08	03				PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase perempuan korban kekerasan yang terlayani sesuai dengan standar		88%	26.516.984			90%	27.028.726
2	08	03	2	01		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan perlindungan perempuan dari segala bentuk kekerasan yang dilaksanakan		1 Regulasi (Perda/Perbup)	13.258.492			1 Regulasi (Perda/Perbup)	13.514.363
2	08	03	2	01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran	1 Dokumen	13.258.492	APBD II		1 Dokumen	13.514.363

KODE						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Rp.	Sumber Dana		Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Rp.
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	08	03	2	02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang tersedia		2 kasus	13.258.492			2 Kasus	13.514.363
2	08	03	2	02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran	2 Layanan	13.258.492	APBD II		2 Layanan	13.514.363
2	08	04				PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase kemandirian PEKKA (Perempuan Kepala Keluarga)		80%	204.000.000			100%	206.800.134
2	08	04	2	01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PEKKA yang mendapatkan pelatihan		1 Kelompok	204.000.000			1 Kelompok	206.800.134
2	08	04	2	01	0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran	12 Dokumen	204.000.000	APBD II		12 Dokumen	206.800.134
2	08	06				PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	1. Persentase pemenuhan kelompok hak anak		0%	0			100%	0
							2. Nilai Kabupaten/Kota Layak Anak		Nindya (700-800)	56.350.944			Nindya (700-800)	62.400.054

KODE						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Rp.	Sumber Dana		Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Rp.
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	08	06	2	02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak yang mendapatkan penguatan dan pengembangan	Kab. Pangandaran	1 Lembaga	56.350.944			1 Lembaga	62.400.054
2	08	06	2	02	0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran	5 Orang	8.950.944	APBD II		5 Orang	9.000.054
2	08	06	2	02	0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran	1 Dokumen	47.400.000	APBD II		1 Dokumen	53.400.000
2	08	07				PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase penurunan kekerasan terhadap anak		12%	66.943.826			10%	69.480.216
2	08	07	2	01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang terlibat dalam pencegahan kekerasan terhadap anak		1 Lembaga	32.710.944			1 Lembaga	34.320.054
2	08	07	2	01	0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan pencegahan KTA	Kab. Pangandaran	2 Orang	32.710.944	APBD II		2 Orang	34.320.054
2	08	07	2	02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang tersedia		1 Lembaga	11.410.944			1 Lembaga	11.720.054

KODE						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Rp.	Sumber Dana		Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Rp.
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	08	07	2	02	0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	Kab. Pangandaran	2 Orang	11.410.944	APBD II		2 Orang	11.720.054
2	08	07	2	03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan bagi anak yang mendapatkan penguatan dan pengembangan		1 Lembaga	22.821.938			1 Lembaga	23.440.108
2	08	07	2	03	0004	Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan AMPK tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan AMPK di tingkat Provinsi yang memiliki sarana dan prasarana layanan sesuai standar	Kab. Pangandaran	1 Lembaga	11.410.994	APBD II		1 Lembaga	11.720.054
2	08	07	2	03	0005	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK	Kab. Pangandaran	1 Kegiatan	11.410.944	APBD II		1 Kegiatan	11.720.054
2	14					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				5.766.465.878				3.309.982.413
2	14	02				PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	1. Persentase laporan pengendalian lapangan tingkat kecamatan sistem informasi kependudukan dan keluarga (SIGA)		100%	313.735.878			100%	114.030.012
							2. Validitas data keluarga beresiko stunting		0%	0			100%	0

KODE						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Rp.	Sumber Dana		Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Rp.
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	14	02	2	01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah koordinasi Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk yang dilaksanakan		1 Kali Kegiatan	37.857.252			1 Kali Kegiatan	37.857.252
2	14	02	2	01	0019	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Kab. Pangandaran	1 Kegiatan	19.178.626	APBD II		1 Kegiatan	19.178.626
2	14	02	2	01	0021	Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah Kerjasama Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal yang dilaksanakan	Kab. Pangandaran	1 Kegiatan	18.678.626	APBD II		1 Kegiatan	18.678.626
2	14	02	2	02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1. Jumlah dokumen pemetaan pengendalian penduduk cakupan daerah yang disusun		1 Dokumen	275.878.626			1 Dokumen	76.172.760
							2. Jumlah dokumen data keluarga beresiko stunting		0 Dokumen	0			2 Dokumen	0
2	14	02	2	02	0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Kab. Pangandaran	10 Laporan	60.000.000	APBD II dan DAK Non Fisik		10 Laporan	17.678.626
2	14	02	2	02	0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Kab. Pangandaran	1 Laporan	76.200.000	APBD II dan DAK Non Fisik		1 Laporan	21.136.882
2	14	02	2	02	0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Kab. Pangandaran	12 Dokumen	120.000.000	APBD II dan DAK Non Fisik		12 Dokumen	17.678.626

KODE						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Rp.	Sumber Dana		Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Rp.
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	14	02	2	02	0015	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	Kab. Pangandaran	1 Unit	19.678.626	APBD II		1 Unit	19.678.626
2	14	03				PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	1. Prevalensi peserta KB aktif		75,79%	3.007.541.000			75,84%	2.634.394.881
							2. Persentase peningkatan pemahaman tentang stunting		0%	0			75%	0
2	14	03	2	01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	1. jumlah kegiatan advokasi, KIE, pengendalian penduduk dan KB yang dilaksanakan		2 Kali Kegiatan	1.147.400.000			2 Kali Kegiatan	1.407.108.835
							2. Jumlah kali rakor tentang stunting tingkat kecamatan		12 Kali Kegiatan	0			12 Kali Kegiatan	0
2	14	03	2	01	0008	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Kab. Pangandaran	12 Laporan	382.400.000	APBD II dan DAK Non Fisik		12 Laporan	853.831.176
2	14	03	2	01	0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Kab. Pangandaran	12 Laporan	315.000.000	APBD II dan DAK Non Fisik		12 Laporan	120.798.350
2	14	03	2	01	0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Kab. Pangandaran	12 Laporan	150.000.000	APBD II dan DAK Non Fisik		12 Laporan	60.248.133

KODE						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Rp.	Sumber Dana		Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Rp.
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	14	03	2	01	0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Kab. Pangandaran	8 Dokumen	100.000.000	APBD II dan DAK Non Fisik		8 Dokumen	320.981.362
2	14	03	2	01	0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Kab. Pangandaran	4 Organisasi	200.000.000	APBD II dan DAK Non Fisik		4 Organisasi	51.249.814
2	14	03	2	02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah PKB/PLKB yang didayagunakan		63 Orang	279.000.000			63 Orang	115.419.624
2	14	03	2	02	0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kab. Pangandaran	1123 Orang	279.000.000	APBD II dan DAK Non Fisik		1123 orang	115.419.624
2	14	03	2	03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah distribusi alat dan obat kontrasepsi ke fasilitas pelayanan kesehatan		336 Kali Kegiatan	1.088.891.000			336 Kali Kegiatan	748.536.498
2	14	03	2	03	0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kab. Pangandaran	12 Laporan	8.500.000	APBD II dan DAK Non Fisik		12 Laporan	119.153.182
2	14	03	2	03	0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan	Kab. Pangandaran	1868 Orang	1.067.691.000	APBD II dan DAK Non Fisik		1906 Orang	591.972.167

KODE						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Rp.	Sumber Dana		Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Rp.
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)							
2	14	03	2	03	0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kab. Pangandaran	12 Laporan	12.700.000	APBD II dan DAK Non Fisik		12 Laporan	37.411.149
2	14	03	2	04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah kampung KB yang mendapat pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB		31 Kampung KB	492.250.000			31 Kampung KB	363.329.924
2	14	03	2	04	0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Kab. Pangandaran	12 Dokumen	3.750.000	APBD II dan DAK Non Fisik		12 Dokumen	181.664.962
2	14	03	2	04	0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Kab. Pangandaran	31 Kampung	488.500.000	APBD II dan DAK Non Fisik		31 Kampung	181.664.962
2	14	04				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1. Persentase peningkatan pemberdayaan Keluarga Sejahtera		79,02%	2.445.189.000			80,02%	561.557.520
							2. Persentase peningkatan pemahaman tentang stunting bagi calon pengantin/calon PUS, Ibu Hamil dan Ibu pasca persalinan		75%	0			75%	0

KODE						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Rp.	Sumber Dana		Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Rp.
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	14	04	2	01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1. Jumlah kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang dibina		2 Kelompok	372.089.000			2 kelompok	397.078.894
							2. Jumlah pembinaan tentang stunting yang dilaksanakan		12 Kali Kegiatan	0			12 kali kegiatan	0
2	14	04	2	01	0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Kab. Pangandaran	2 Laporan	52.889.000	APBD II		2 Laporan	397.078.894
2	14	04	2	01	0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan KetahananKeluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Kab. Pangandaran	1 Laporan	19.200.000	APBD II dan DAK Non Fisik		0 Orang	0
2	14	04	2	01	0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	Kab. Pangandaran	30 Unit	300.000.000	APBD II dan DAK Non Fisik		0 Unit	0
2	14	04	2	02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga		5 Kelompok	2.073.100.000			5 Kelompok	164.478.626

KODE						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Rp.	Sumber Dana		Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Rp.
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	14	04	2	02	0003	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab. Pangandaran	4 Organisasi	13.000.000	APBD II		4 Organisasi	164.478.626
2	14	04	2	02	0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Kab. Pangandaran	12 Laporan	981.000.000	DAK Non Fisik		0 Laporan	0
2	14	04	2	02	0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	Kab. Pangandaran	12 Laporan	1.079.100.000	DAK Non Fisik		0 Laporan	0
JUMLAH										9.934.145.353				7.760.939.734

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi, sedangkan program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

Dalam Rencana Kerja (Renja) 2025 DKBP3A Kab. Pangandaran terdapat 9 Program, 24 Kegiatan dan 55 sub kegiatan, 1 Program, 7 kegiatan dan 19 sub kegiatan merupakan Penyelenggaraan Non Urusan. Sedangkan 8 Program, 17 kegiatan dan 36 sub kegiatan merupakan Penyelenggaraan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar. Dari jumlah Program dan Kegiatan diatas, DKBP3A Kab. Pangandaran memiliki usulan Pagu indikatif dengan total **Rp. 9.934.147.000,-**. Jika dibagi kedalam Urusan maka DKBP3A memiliki Pagu Indikatif yakni, Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dengan total Pagu **Rp. 532.660.538,-** dan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana memiliki total Pagu Indikatif sebesar **Rp. 5.766.465.878,-**, sedangkan Non Urusan/Penunjang sebesar **Rp. 3.635.020.584,-**.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam uraian sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota memiliki outcome/hasil yakni Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi sebesar 95%, Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik sebesar 100%, Persentase peningkatan kompetensi aparatur

sebesar 95% dan Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas sebesar 100%. Program ini memiliki sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dengan A (80-90). Terdiri dari 7 kegiatan dan 19 sub kegiatan yang didanai dari APBD Kabupaten sebesar Rp. 3.635.020.584,-. Berikut adalah kegiatan-kegiatan dan sub kegiatan yang akan menunjang indikator hasil dalam Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota :

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut;
 1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, sub kegiatan ini memiliki masukan Rp. 10.000.000,- , dengan keluaran 3 laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersusun. Dokumen ini merupakan dokumen Laporan Evaluasi Kinerja yang disusun guna menyampaikan pencapaian Kinerja dalam kurun waktu 1 tahun.
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut;
 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, sub kegiatan ini memiliki masukan Rp. 2.675.576.974,- , dengan keluaran 19 orang/bulan pegawai yang menerima gaji dan tunjangan;
 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, sub kegiatan ini memiliki masukan Rp. 5.000.000,- , dengan keluaran 1 laporan keuangan akhir tahun. Kegiatan ini dimaksudkan sebagai upaya Evaluasi terhadap kinerja Keuangan dalam kurun waktu 1 tahun.

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut;

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya, sub kegiatan ini memiliki masukan Rp. 36.800.000,- , dengan keluaran 120 paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan. Kegiatan ini merupakan suatu bentuk upaya dalam menciptakan kedisiplinan dari sisi kedisiplinan berpakaian;

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut;

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, sub kegiatan ini memiliki masukan Rp. 6.564.615,- , dengan keluaran 6 paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan;
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, sub kegiatan ini memiliki masukan Rp. 49.742.197, -, dengan keluaran 50 paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor disediakan;
3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, sub kegiatan ini memiliki masukan Rp. 13.505.586, -, dengan keluaran 28 paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan;
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, sub kegiatan ini memiliki masukan Rp. 17.050.000, -, dengan keluaran 6 paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan;
5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, sub kegiatan ini memiliki masukan Rp. 11.675.091,- , dengan keluaran 9 dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan;
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, sub kegiatan ini memiliki masukan Rp. 78.600.000,- , dengan keluaran 50 laporan Rapat

Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan.

- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut;
1. Pengadaan Mebel, sub kegiatan ini memiliki masukan Rp. 14.800.000,- , dengan keluaran 16 Unit mebel yang diadakan. Kegiatan ini berisikan belanja modal mebeleur untuk memenuhi sarana dan prasarana perkantoran;
 2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, sub kegiatan ini memiliki masukan Rp. 123.086.740,- , dengan keluaran 19 Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan. Kegiatan ini berisikan belanja modal berupa barang yang termasuk peralatan kantor lainnya;
 3. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, sub kegiatan ini memiliki masukan Rp. 140.000.000,- , dengan keluaran 3 Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan.
- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut;
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat, sub kegiatan ini memiliki masukan Rp. 5.000.000,- , dengan keluaran 12 laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang disediakan;
 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, sub kegiatan ini memiliki masukan Rp. 33.298.865,- , dengan keluaran 36 laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik disediakan;
 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, sub kegiatan ini memiliki masukan Rp. 348.936.000,- , dengan keluaran 60 laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan.

h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut;

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, sub kegiatan ini memiliki masukan Rp. 31.000.000,- , dengan keluaran 1 unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya;
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, sub kegiatan ini memiliki masukan Rp. 22.596.500,- , dengan keluaran 60 unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya;
3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, sub kegiatan ini memiliki masukan Rp. 15.000.000,- , dengan keluaran 106 unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara;

B. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan

Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan memiliki outcome/ hasil yakni Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah sebesar 16,79% dan Persentase Kelembagaan PUG aktif sebesar 95,38%. Program ini memiliki sasaran Meningkatnya Peranan Perempuan dalam Proses Pembangunan dengan keluaran Persentase Perempuan sebagai Tenaga Profesional sebesar 51,86%, Persentase Partisipasi Angkatan kerja Perempuan sebesar 26,29% dan Persentase Keterlibatan Perempuan di Parlemen sebesar 30%. Terdiri dari 2 kegiatan dan 4 sub kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 178.848.784,- . Berikut adalah kegiatan-kegiatan dan sub kegiatan yang akan menunjang indikator hasil dalam Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan:

- a. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan sebagai berikut;
1. Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG, sub kegiatan ini memiliki masukan Rp. 14.849.680,- , dengan keluaran 1 dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/ Kota yang dilaksanakan. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang bertujuan memperkuat jaringan kelembagaan atau dengan kata lain memperkuat alur koordinasi;
 2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota, sub kegiatan ini memiliki masukan Rp. 14.849.402,- , dengan keluaran 1 Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/ Kota yang dilaksanakan;
 3. Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG, sub kegiatan ini memiliki masukan Rp. 14.849.702,- , dengan keluaran 100 Orang yang mengikuti sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kab/Kota. Kegiatan ini merupakan upaya untuk meningkatkan kesetaraan Gender sehingga kesenjangan antara laki-laki dan perempuan tidak begitu signifikan.
- b. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan sebagai berikut;
1. Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi, sub kegiatan ini memiliki masukan Rp. 134.300.000,- , dengan keluaran 1 dokumen hasil Sosialisasi

Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota. Kegiatan ini berupa kegiatan mengenai pembuatan regulasi ataupun peraturan sebagai upaya memperkuat pelaksanaan ataupun implementasi dari tufoksi, khususnya mengenai peningkatan kualitas hidup perempuan, agar perempuan tidak lagi menjadi kaum yang termarginalkan, sehingga perempuan memiliki garapan yang luas baik di bidang sosial, politik, ekonomi, pendidikan dan budaya. Lokasi target dari kegiatan ini yakni organisasi yang ada di wilayah Pemerintahan Kab. Pangandaran. Hal ini juga didasarkan kepada sebuah kenyataan bahwa banyak rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan (janda), dan diharapkan kegiatan ini dapat membuka komunitas perempuan miskin sehingga mampu berdaya saing khususnya dalam bidang ekonomi. Lokasi dari kegiatan ini yakni berada di wilayah Pemerintahan Kab. Pangandaran;

C. Program Perlindungan Perempuan

Program Perlindungan Perempuan memiliki outcome/ hasil yakni Persentase perempuan korban kekerasan yang terlayani sesuai dengan standar sebesar 88%. Program ini memiliki sasaran Pelayanan terhadap korban kekerasan dengan keluaran Persentase korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang mendapat layanan Komprehensif sebesar 100%. Terdiri dari 2 kegiatan dan 2 sub kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 26.516.984,-. Berikut adalah kegiatan-kegiatan dan sub kegiatan yang akan menunjang indikator hasil dalam Program Perlindungan Perempuan:

- a. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan sebagai berikut;

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota, sub kegiatan ini memiliki masukan Rp. 13.258.492,- , dengan keluaran 1 dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota;
- b. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan sebagai berikut;
 1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota, sub kegiatan ini memiliki masukan Rp. 13.258.492,- , dengan keluaran 2 layanan Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota.

D. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Program Peningkatan Kualitas Keluarga memiliki outcome/ hasil yakni Persentase kemandirian PEKKA (Perempuan Kepala Keluarga) sebesar 80%. Program ini memiliki sasaran Meningkatnya Sumbangan Pendapatan Perempuan dengan keluaran Persentase sumbangan Pendapatan Perempuan sebesar 36,30%. Terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 204.000.000,- . Berikut adalah kegiatan dan sub kegiatan yang akan menunjang indikator hasil dalam Program Peningkatan Kualitas Keluarga:

a. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan sebagai berikut;

1. Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota, sub kegiatan ini memiliki masukan Rp. 204.000.000,- , dengan keluaran 12 Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota.

F. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) memiliki outcome/ hasil yakni Nilai Kabupaten/Kota Layak Anak dengan kriteria Nindya (700-800). Program ini memiliki sasaran Pelayanan terhadap korban kekerasan dengan keluaran Persentase korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang mendapat layanan Komprehensif sebesar 100%. Terdiri dari 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 56.350.944,- . Berikut adalah kegiatan dan sub kegiatan yang akan menunjang indikator hasil dalam Program Pemenuhan Hak Anak (PHA):

a. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota, sub kegiatan ini memiliki masukan Rp. 8.950.944,- , dengan keluaran 5 orang Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota;
2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, sub kegiatan ini memiliki masukan Rp. 47.400.000,- , dengan keluaran 1 dokumen Hasil Koordinasi dan

Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas
Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota;

G. Program Perlindungan Khusus Anak

Program Perlindungan Khusus Anak memiliki outcome/ hasil yakni Persentase penurunan kekerasan terhadap anak sebesar 12%. Program ini memiliki sasaran Pelayanan terhadap korban kekerasan dengan keluaran Persentase korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang mendapat layanan Komprehensif sebesar 100%. Terdiri dari 3 kegiatan dan 4 sub kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 66.943.826,- . Berikut adalah kegiatan dan sub kegiatan yang akan menunjang indikator hasil dalam Program Perlindungan Khusus Anak:

a. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan sebagai berikut;

1. Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA, sub kegiatan ini memiliki masukan Rp. 32.710.944,- , dengan keluaran 2 orang SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan pencegahan KTA;

b. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan sebagai berikut;

1. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, sub kegiatan ini memiliki masukan Rp. 11.410.944,- , dengan keluaran 2 orang AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan.

c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan

Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan sebagai berikut;

1. Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan AMPK tingkat Kabupaten/kota, sub kegiatan ini memiliki masukan Rp. 11.410.994,- , dengan keluaran 1 Lembaga Penyedia Layanan AMPK di tingkat Provinsi yang memiliki sarana dan prasarana layanan sesuai standar;
2. Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota, sub kegiatan ini memiliki masukan Rp. 11.410.994,- , dengan keluaran 1 kegiatan Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK.

H. Program Pengendalian Penduduk

Program Pengendalian Penduduk memiliki outcome/ hasil yakni Persentase laporan pengendalian lapangan tingkat kecamatan sistem informasi kependudukan dan keluarga (SIGA) sebesar 100%. Program ini memiliki sasaran Meningkatnya Pelayanan Keluarga Berencana dengan keluaran Total Fertility Rate (TFR) sebesar 2,16%. Terdiri dari 2 kegiatan dan 6 sub kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 313.735.878,- . Berikut adalah kegiatan dan sub kegiatan yang akan menunjang indikator hasil dalam Program Pengendalian Penduduk:

- a. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk, dengan sub kegiatan sebagai berikut;
 1. Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal, sub kegiatan ini memiliki masukan Rp. 19.178.626,- , dengan keluaran 1 Kegiatan Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal;

2. Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal, sub kegiatan ini memiliki masukan Rp. 18.678.626,- , dengan keluaran 1 Kegiatan Kerjasama Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal yang dilaksanakan;
- b. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan sebagai berikut;
 1. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga, sub kegiatan ini memiliki masukan Rp. 60.000.000,- , dengan keluaran 10 Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga;
 2. Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga, sub kegiatan ini memiliki masukan Rp. 76.200.000,- , dengan keluaran 1 Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga;
 3. Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB, sub kegiatan ini memiliki masukan Rp. 120.000.000,- , dengan keluaran 12 Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB;
 4. Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain, sub kegiatan ini memiliki masukan Rp. 19.678.626,- , dengan keluaran 4 Unit Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk;

I. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) memiliki outcome/ hasil yakni Prevalensi peserta KB aktif sebesar 75.79%. Program ini memiliki sasaran Meningkatnya Pelayanan

Keluarga Berencana dengan keluaran Total Fertility Rate (TFR) sebesar 2,16%. Terdiri dari 4 kegiatan dan 11 sub kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 3.007.541.000,- . Berikut adalah kegiatan dan sub kegiatan yang akan menunjang indikator hasil dalam Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB):

- a. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal, dengan sub kegiatan sebagai berikut;
 1. Pengendalian Program KKBPK, sub kegiatan ini memiliki masukan Rp. 382.400.000,- , dengan keluaran 12 Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK;
 2. Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana, sub kegiatan ini memiliki masukan Rp. 315.000.000,- , dengan keluaran 12 Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana);
 3. Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok), sub kegiatan ini memiliki masukan Rp. 150.000.000,- , dengan keluaran 12 Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok);
 4. Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang, sub kegiatan ini memiliki masukan Rp. 100.000.000,- , dengan keluaran 8 Dokumen

Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang;

5. Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja, sub kegiatan ini memiliki masukan Rp. 200.000.000,- , dengan keluaran 4 Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana(Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja.

b. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB), dengan sub kegiatan sebagai berikut;

1. Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP), sub kegiatan ini memiliki masukan Rp. 279.000.000,- , dengan keluaran 1123 Orang Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP);

c. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan sebagai berikut;

1. Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya, sub kegiatan ini memiliki masukan Rp. 8.500.000,- , dengan keluaran 12 Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya;

2. Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), sub kegiatan ini memiliki masukan Rp. 1.067.691.000,- , dengan keluaran 1868 Orang yang Mengikuti Kesertaan

Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP);

3. Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya, sub kegiatan ini memiliki masukan Rp. 12.700.000,- , dengan keluaran 12 Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya;

d. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB, dengan sub kegiatan sebagai berikut;

1. Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB, sub kegiatan ini memiliki masukan Rp. 3.750.000,- , dengan keluaran 12 Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB;
2. Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas, sub kegiatan ini memiliki masukan Rp. 488.500.000,- , dengan keluaran 31 Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana).

J. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) memiliki outcome/hasil yakni Persentase peningkatan pemberdayaan Keluarga Sejahtera sebesar 79,02%. Program ini memiliki sasaran Meningkatnya Pelayanan Keluarga Berencana dengan keluaran Total Fertility Rate (TFR) sebesar 2,16%. Terdiri dari 2 kegiatan dan 6 sub kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 2.445.189.000,- . Berikut adalah

kegiatan dan sub kegiatan yang akan menunjang indikator hasil dalam Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS):

- a. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, dengan sub kegiatan sebagai berikut;
 1. Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga), sub kegiatan ini memiliki masukan Rp. 52.889.000,- , dengan keluaran 2 Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga);
 2. Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS), sub kegiatan ini memiliki masukan Rp. 19.200.000,- , dengan keluaran 1 Laporan hasil pengelolaan KetahananKeluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS);
 3. Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA), sub kegiatan ini memiliki masukan Rp. 300.000.000,- , dengan keluaran 30 Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia;
- b. Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan

dan Kesejahteraan Keluarga, dengan sub kegiatan sebagai berikut;

1. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS), sub kegiatan ini memiliki masukan Rp. 13.000.000,- , dengan keluaran 4 organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS);
2. Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita), sub kegiatan ini memiliki masukan Rp. 981.000.000,- , dengan keluaran 12 laporan Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita);
3. Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita), sub kegiatan ini memiliki masukan Rp. 1.079.100.000,- , dengan keluaran 12 laporan Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan.

BAB V

PENUTUP

Demikian Rencana Kerja (Renja) DKBP3A Kabupaten Pangandaran disusun yang merupakan Perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang berpedoman kepada RPJMD dan bersifat Indikatif selanjutnya akan terus dijabarkan kedalam pembuatan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) yang telah mengacu pada Visi, Misi, arah dan sasaran sehingga dapat dijadikan pedoman bagi seluruh kepentingan yang menjadi media untuk mensinergiskan arah, sasaran dan tahapan dalam melaksanakan Pembangunan, selanjutnya. yang nantinya akan dievaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan Program/Kegiatan di masa yang akan datang. Sehingga dapat diketahui sejauh mana tingkat keberhasilan ataupun kegagalan dalam pelaksanaan.

Selain dari pada itu dalam penentuan keberhasilan pelaksanaan kegiatan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan komitmen para pemangku kepentingan, dari seluruh masyarakat guna tercapainya pelaksanaan kegiatan dalam Akan tetapi dalam menentukan keberhasilan, selain adanya penambahan anggaran biaya tambahan atau kegiatan transisi juga ditentukan oleh tingkat kepuasan masyarakat yang telah diberikan pelayanan atau semangat dan kualitas kerja para penyelenggara serta derajat jaringan kerja yang berhasil dibangun. Oleh karena itu prinsip penata kelolaan (governance) yang baik yaitu akuntabilitas, transparansi, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, efektivitas dan efisiensi perlu dijunjung tinggi sebagai rambu-rambu bagi setiap penanggung jawab dalam pelaksana program dan kegiatan.

Kiranya Rencana Kerja (Renja) ini dapat dijadikan acuan/pedoman di DKBP3A Kabupaten Pangandaran sehingga dapat berhasil guna bermanfaat bagi kita semua dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kabupaten Pangandaran.

Parigi, 24 Juli 2024

KEPALA DKBP3A
KABUPATEN PANGANDARAN



H. DANI HAMDANI, S.Sos., MM
NIP. 196504171990031013